



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

SAMARINDA
JULI 2023

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kata Pengantar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan Renstra SKPD setelah disesuaikan dengan RPD 2024 – 2026 oleh karena itu setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 hendaknya dapat merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatar belakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan dan berbasis kinerja.

Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan perhubungan, senantiasa tetap berpegang pada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras (*hardware*) seiring, sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak (*software*) serta pengembangan sumber daya manusia (*brainware*).

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026.

Dengan telah selesainya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, harapan kami pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dan operasional Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dapat searah, sejalan, selaras dan berkesinambungan dengan Dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur serta Rancangan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

Samarinda, Mei 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke with a small loop in the middle.

YUDHA PRANOTO, S.E
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640817 201006 1 001



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	68
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	79
3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	79
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	106
Bab IV Tujuan Dan Sasaran	109
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	109
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	119
5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	119
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	123
6.1. Program Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur	123
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	138
Bab VIII Penutup	160
8.1. Kesimpulan	160
8.2. Saran.....	160

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari kebijakan Pembangunan Nasional, yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan yang ada di daerah harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Nasional, sehingga mampu menjamin kesesuaian pelaksanaan pembangunan, baik antar daerah/wilayah maupun antar sektor.

Kondisi perekonomian masyarakat Kalimantan Timur saat masih belum stabil dan saat ini diperparah oleh dampak ekonomi global yang diprediksi akan mengalami resesi global, kenaikan harga BBM sehingga angka kemiskinan, jumlah pengangguran dan lemahnya kemampuan berkompetisi dalam skala global perlu menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan pembangunan, sehingga secara bertahap dan sistematis dapat ditangani. Kegiatan pembangunan bidang perhubungan mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong upaya pemerataan dan laju pembangunan daerah.

Upaya menggali potensi sumber daya yang ada di berbagai daerah, pengembangan sentra-sentra produksi dan pemenuhan terhadap kebutuhan pasar tentunya harus didukung oleh infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai dan efisien, sehingga kegiatan ekonomi wilayah menjadi lebih kompetitif. Oleh karena itu konsep perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah, termasuk bidang perhubungan harus terintegrasi dengan konsep pembangunan sektor-sektor lainnya, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri dan perdagangan, sehingga akan mampu membangun sinergi bagi upaya memacu laju pembangunan daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Provinsi harus mampu mengintegrasikan seluruh perencanaan dan program pembangunan, yang kemudian dijabarkan pada masing-masing sektor dan atau lembaga sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Secara yuridis formal, integrasi RENSTRA Pembangunan dalam skala

Nasional dan Daerah ini telah tertuang dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan peraturan perundangan tersebut, disusun mengacu pada keselarasan program-program prioritas yang mendukung upaya penyelesaian program strategis nasional yang termuat di Renstra Kementerian Perhubungan RI dan keterkaitan penjabaran dari RPD Provinsi Kalimantan Timur yang memuat konsep, kebijakan dan program pembangunan bidang Perhubungan.

Mengingat kegiatan pembangunan bidang perhubungan tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha (swasta) dan masyarakat, maka kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA harus memberi ruang yang cukup bagi partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini menjadi sangat penting ketika kemampuan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah terbatas. Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka pemerintah (baik pusat maupun daerah) harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan controller sehingga pengendalian pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat tetap terjaga.

Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor : 86 Tahun 2017, Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan SKPD, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaahan hasil evaluasi Renstra lima tahun sebelumnya, dan telaahan RPJMD 2024 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 -2026 disusun berdasarkan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan aturan turunannya;
18. Inmendagri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) adalah menyelaraskan agenda perencanaan pembangunan bidang Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Akhir Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur untuk rentang waktu implementasi perencanaan tahun 2024 – 2026.

Sedangkan tujuan dari kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah :

1. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan bidang perhubungan ;
2. Merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan Bidang Perhubungan ;
3. Mengakomodasikan seluruh aspirasi yang berkembang baik dari lembaga pemerintah, asosiasi profesi, dan masyarakat umum ;
4. Menetapkan hasil kegiatan penelitian ini sebagai kebijakan pembangunan Bidang Perhubungan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Menyelaraskan dengan dinamika perubahan yang terjadi pada tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 52 tahun 2022, sistematika Penulisan Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota, juga memuat dasar hukum, maksud dan tujuan Renstra Perangkat Daerah serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memuat informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah sekaligus Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Isu Startegis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja tujuan/sasaran pada tahun berjalan sampai dengan lima tahun kedepan.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang, juga akan menjelaskan relevansi dan konsistensi untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026, berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat yang tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan bahwa penyelenggaraan transportasi merupakan urat nadi pembangunan bangsa. Hal ini dapat disadari, bahwa penyelenggaraan transportasi erat terkait dan melekat dengan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya bangsa. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan memiliki sensitifitas tinggi serta memiliki nilai manfaat berganda (*multiplier effect*) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat.

Menyadari kedudukan dan peranannya yang sangat strategis itu, yaitu sebagai faktor pendorong, penunjang dan pendukung pembangunan, maka penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu secara effect langsung (*direct effect*) dan effect tidak langsung (*indirect effect*) memberikan stimulus dan manfaat ekonomi (*economic benefit*) yang tinggi. Demikian juga sebaliknya harus mampu mengeliminasi dampak samping operasional transportasi jalan yang dapat menimbulkan beban dan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*).

Oleh karenanya didalam Rancangan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan ditetapkan sebagai bagian kegiatan dalam menunjang pencapaian perwujudan salah satu kebijakan utama pembangunan Kalimantan Timur, yaitu dalam hal pencapaian perwujudan kebijakan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit usaha dan lembaga - lembaga ekonomi.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Urusan Wajib Pemerintahan di Bidang Perhubungan

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, maka pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1. Sub Urusan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kewenangan:**
- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;
 - b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
 - c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B;
 - d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi;
 - e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi;
 - f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi;
 - g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - h. Penetapan kawasan perKotaan untuk pelayanan angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
 - i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi dan perKotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perKotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kota/Kabupaten dalam 1(satu) daerah Provinsi;
 - l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang, dalam Trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang Melayani trayek antarKota dalam daerah Provinsi serta Angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi;
- 2. Sub Urusan Bidang Pelayaran, Kewenangan :**
- a. Penertiban izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;

- b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi, pelabuhan antar - daerah Provinsi, dan pelabuhan internasional;
- c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah Kabupaten / Kota dalam daerah Provinsi yang bersangkutan;
- d. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah Kab/Kota dalam daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi;
- e. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah Kab/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi.
- f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.
- g. Penetapan tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan besertamuatannya pada lintas penyebrangan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
- h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpul regional;
- i. Pembangunan, Penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul regional;
- j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi;
- k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul regional;
- l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
- m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;

- o. Penertiban izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingansendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan regional.

3. Sub Urusan Bidang Perkeretapian, Kewenangan :

- a. Penetapan rencana induk perkeretapian Provinsi ;
- b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kab/Kota;
- c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 daerah Kab/Kota dalam Provinsi ;
- d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Provinsi ;
- e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi ;
- f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretapian pada jaringan jalur perkeretapian Provinsi ;
- g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

2.1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Merujuk Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016, Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;

- c. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Struktur Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - Subbag Perencanaan Program dan Keuangan
 - Subbag Umum
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Seksi Lalu Lintas Jalan
 - Seksi Angkutan Jalan
 - Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana
3. Bidang Pelayaran
 - Seksi Kepelabuhanan
 - Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran
 - Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
4. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian
 - Seksi Perkeretaapian
 - Seksi Lingkungan Perhubungan
 - Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan
5. UPTD Terminal Type B
 - Subbag Tata Usaha
 - Seksi Operasional I
 - Seksi Operasional II

2.1.2.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat

1. Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi;

2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu 2 Kasubbag yaitu Kasubbag Perencanaan, Program & Keuangan dan Kasubbag Umum dengan tugas sebagai berikut :

A). Tugas Sub. Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan asset.

B). Tugas Sub. Bagian Umum

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

2.1.2.2. Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan dan Angkutan Jalan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang LLAJ dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian lalu lintas jalan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Lalu Lintas Jalan pada jalan – jalan Provinsi dan mengusulkan kebutuhan pada jalan - jalan Nasional.

B) Tugas Seksi Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian angkutan jalan.

C) Tugas Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian keselamatan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

2.1.2.3. Tugas Dan Fungsi Bidang Pelayaran

1. Tugas

Melaksanakan koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyiapan penetapan lokasi, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan laut wilayah laut Provinsi, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan Provinsi, dan penetapan lintas penyeberangan dalam Provinsi, serta pengendalian operasional lalu lintas angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pelayaran dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Tugas Seksi Kepelabuhanan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kepelabuhanan.

B) Tugas Seksi Badan Usaha & Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

C) Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP.

2.1.2.4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

1. Tugas

Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian di Kabupaten / Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil,

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.

2. Fungsi

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pemaduan moda dan teknologi perhubungan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Tugas Seksi Perkeretaapian

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perkeretaapian.

B) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Lingkungan Perhubungan.

C) Tugas Seksi Keterpaduan Moda & Teknologi Perhubungan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan.

2.1.2.5. UPTD Terminal

1. Tugas

Pembinaan, bimbingan, pengendalian pengawasan dan operasional terminal tipe B di Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara (PPU), Kab. Kutai Barat (Kubar), Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur (Kutim) dan Kab. Berau. Melakukan

pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan / pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, Melakukan monitoring dan evaluasi operasional UPTD Terminal sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.

2. Fungsi

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam operasional dan pengendalian terminal tipe B di Kab. Paser, Kab. Paser Penajam Utara (PPU), Kab. Kutai Barat (Kubar), Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur (Kutim) dan Kab. Berau.
- b. Mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Terminal dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPTD Terminal Type B dibantu 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Sub Bagian Tata Usaha

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat diselesaikan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan,

rumah tanggadan kehumasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan dan tertib administrasi.

6. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
8. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas dan evaluasi selanjutnya.
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

B) Seksi Operasional Wilayah I

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Operasional Wilayah I berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

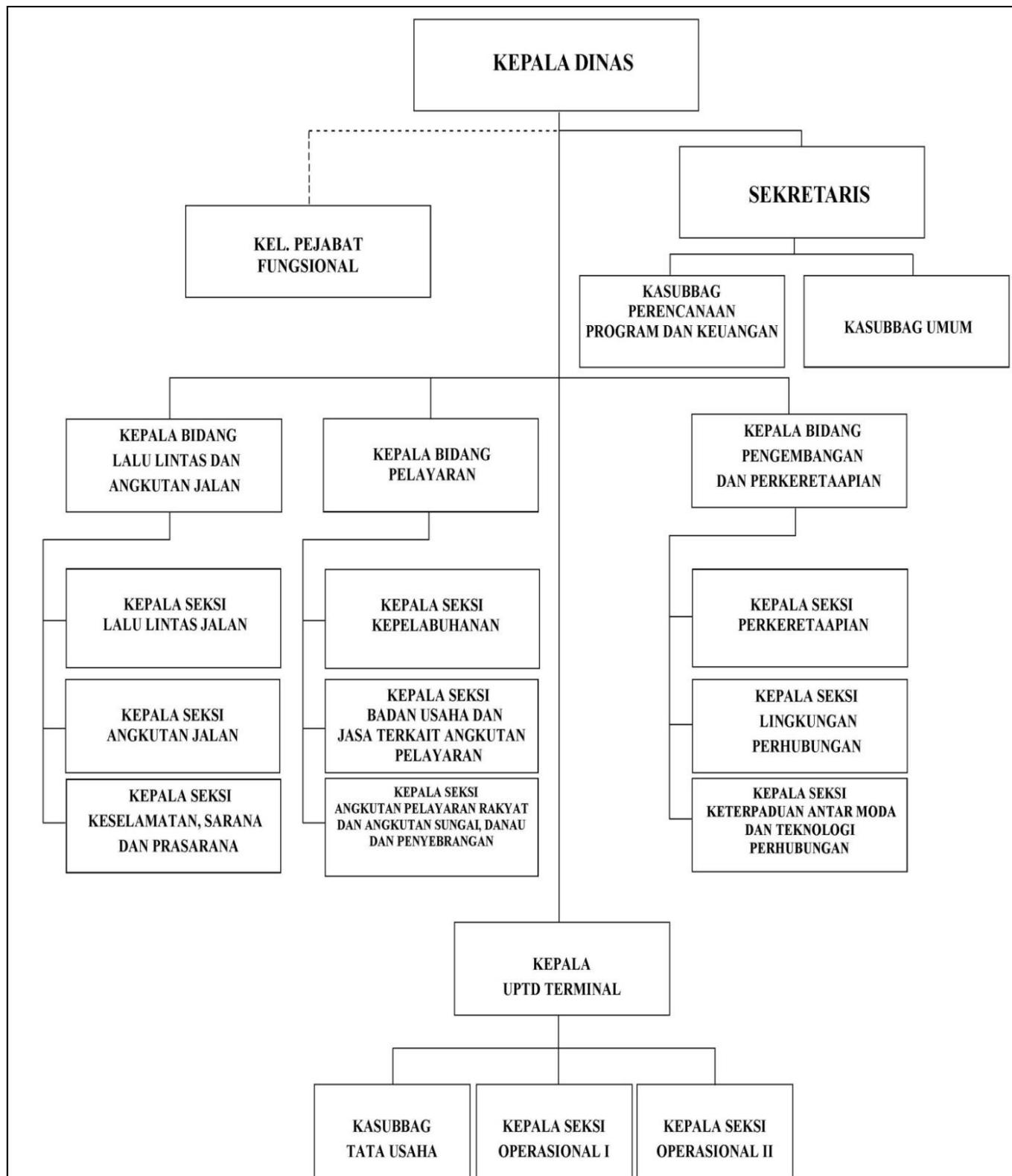
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Operasional Wilayah I berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasional lapangan pada wilayah UPTD Terminal Wilayah I di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau.
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan operasional sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Kabupaten / Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

C) Seksi Operasional Wilayah II

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Operasional Wilayah II berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Operasional Wilayah II berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasional lapangan pada wilayah UPTD Terminal Wilayah II diKab. Paser, Kab. PPU, Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Kartanegara (Kukar);
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan operasional sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Kabupaten / Kota Balikpapan, Kab. Paser, Kab. PPU, Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Kartanegara (Kukar) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada tahun 2022 seluruhnya sebanyak 81 Orang ASN dan 85 Orang Non ASN.

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No	Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	13	7	-	22
3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2	6	3	-	11
4	Bidang Pelayaran	2	5	3	-	10
5	Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian	2	4	1	-	7
6	UPTD Terminal	2	8	19	-	29
7	Tenaga Non ASN	-	-	-	-	85
Jumlah		11	36	33	0	166

Sumber : Subbag. Kepegawaian Dishub Kaltim, Desember 2022

2.2.2 Aset yang dikelola

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Aset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Neraca Aset Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Tahun 2022

No	Nama Barang	Nilai (Rp.)
	ASET TETAP	
1.	Tanah	71.295.943.250,00
2.	Peralatan dan Mesin	53.973.356.137,00
3.	Gedung dan Bangunan	51.923.394.141,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.957.814.373,00
5.	Aset Tetap Lainnya	823.035.125,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	91.658.615.944,00
7.	ASET LAINNYA	453.366.089.306,67

Aset Dinas Perhubungan terdiri dari aset yang ada di Dinas Perhubungan, UPTD Terminal dan Pelabuhan penyeberangan Kariangau.

Khusus prasarana kendaraan dinas/operasional di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Komposisi Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2

No	Jenis/Merk Kendaraan	No. Polisi	Tahun Pembua tan	Kondisi
A	KENDARAAN R 4			
1	Toyota Fortuner 2.7 G	KT 1042 BZ	2021	Baik
2	Toyota Veloz	KT 1396 B	2022	Baik
3	Toyota Fortuner 2.7 G	KT 1716 BZ	2011	Baik
4	Mitsubhisi Expander	KT 1775 B	2022	Baik
5	Toyota Hilux	KT 8486 BZ	2021	Baik
6	Toyota INOVA	KT 1337 BZ	2010	Baik
7	Isuzu Touring 541 LM 25 Long	KT 1907 BZ	2003	Rusak Ringan
8	Suzuki Mega Carry Extra / Pick Up	KT 8879 BZ	2012	Rusak Ringan
9	Suzuki AVP SGX	KT 1564 BZ	2010	Baik
10	Toyota Kijang STD	KT 1273 BZ	2001	Rusak Berat
11	Ford Everest 2,5 XLT	KT 1369 BZ	2004	Baik
12	Mitsubhisi L200 Double Cabin	KT 8336 BZ	2005	Baik
13	Mitsubhisi L200 Double Cabin	KT 1902 BZ	2003	Rusak Berat
14	Ford Ranger SGL	KT 8473 BZ	2004	Rusak Berat
15	Isuzu TBR 541 LM 25 Long	KT 2369 BZ	2003	Rusak Ringan
16	Toyota Avanza	KT 1014 BZ	2008	Baik
17	Toyota Avanza	KT 1540 BZ	2008	Baik
18	Toyota Avanza	KT 1015 BC	2005	Baik
19	Toyota Kijang STD	KT 2408 BZ	2001	Rusak Berat

B	KENDARAAN R2			
1	Sepeda motor/Yamaha 5 LM	KT 5730 B	2002	Rusak Berat
2	Sepeda Motor/Honda CB15A1RRF	KT 4759 M	2003	Baik
3	Sepeda Motor/Honda NF 125 D	KT 4102 MZ	2005	Baik
4	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4698 MZ	2008	Baik
5	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4699 MZ	2008	Baik
6	Sepeda Motor/HondaGL 160 D	KT 4819 MZ	2009	Baik
7	Sepeda Motor/Honda NC11B1C	KT 4818 MZ	2009	Baik
8	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3934 B	2010	Baik
9	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3935 B	2010	Baik
10	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3932 B	2010	Baik
11	Sepeda Motor/Honda GLP III	KT 4012 MZ	2004	Baik

12	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3252 M	2011	Baik
13	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3245 M	2011	Baik
14	Sepeda Motor/Honda ACB2J22B03	KT 6396 MZ	2002	Baik
15	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3429 MZ	2012	Baik
16	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3430 MZ	2012	Baik
17	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3431 MZ	2012	Baik
18	Sepeda Motor/Honda ACB2J22B03	KT 6379 MZ	2012	Baik
19	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5975 B	2020	Baik
20	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 6966 B	2020	Baik
21	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5979 B	2020	Baik
22	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5077 B	2020	Baik
23	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5700 B	2020	Baik
24	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5600 B	2020	Baik
25	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2309 B	2021	Baik
S26	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2317 B	2021	Baik
u m27	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2324 B	2021	Baik
b e28	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2386 B	2021	Baik
r29	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2372 B	2021	Baik
30	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2284 B	2021	Baik

Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kendaraan operasional yang terdapat di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 19 kendaraan roda empat dan 30 kendaraan roda dua kendaraan dengan kondisi seperti tabel diatas.

Tabel. 2.5

Luas Bangunan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

NO	NAMA BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (M²)	JML LANTAI	LUAS KESELURUHAN (M²)
1	Bangunan Induk	2,950	2	5,900
2	Gedung Koperasi	180	1	180
3	Gedung Dharma Wanita	419	1	419
4	Musholla	157	1	157
5	Kantin lama	32	1	32
6	Bangunan baru	202	2	404
	LUAS KESELURUHAN			7,092

Sumber: Subbag Umum Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas keseluruhan pada kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim adalah seluas 7.092 m².

Untuk komposisi peralatan dan perlengkapan kantor utama yang digunakan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.6.
Komposisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas
Perhubungan Prov. Kalimantan Timur

No	Jenis Asset	Jumlah/ Satuan	Lokasi	Ket
1	Personal Komputer	86 Unit	Samarinda	
2	Printer	79 Unit	Samarinda	
3	Laptop	32 Unit	Samarinda	
4	AC	51 Unit	Samarinda	
6.	Genset	1 Unit	Samarinda	

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2022

Sedangkan unit usaha di Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur yang sampai saat ini masih operasional adalah Koperasi Panca Citra Dishub dengan kepengurusan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Nomor : SK. 860/0219/KPN-Dishub/IX/2017 tanggal 11 September 2017.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 A. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019-2022 (TC.23) dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja SKPD	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi								
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	83	83	83	84	84	85	83	87	85	88	-
Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	Izin	180	180	180	190	190	200	250	250	107	300	-
Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan penyeberangan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-
Jumlah Izin Jasa Pelayaran	Izin	40	40	40	45	45	50	75	100	88	100	-
Jumlah Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Penetapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	%	80	80	80	90	90	95	88.02	97	97	97.5	-

Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau	%	75	75	75	78	78	81	81	83	0	93.34	-
Persentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	%	0	0	0	0	0	20	20	50	50	80	-
Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
Jumlah Rencana Lintasan/ Trase Kereta Api	Penetapan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	846	683	570	598	448	512	418	427	195	342	-
Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	%	30	40	40	50	50	60	60	70	75.23	80	-
Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	Perencanaan	0	1	1	2	2	2	2	5	5	4	-
Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	Orang	500.000	550.000	550.000	600.000	600.000	650.000	301083	700.000	377.969	750.000	-

Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	%	60	70	0	75	0	80	0	85	47.36	100	-
Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	Izin Andalalin	0	0	0	0	0	10	0	20	20	30	-
Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	%	40	42.5	42.5	50	50	55	41.25	75	75	85	-
Penambahan Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	Unit	15	15	0	20	0	27	0	18	0	20	-
Jumlah Penetapan Kawasan	Penetapan	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	-
Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	Penetapan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	Izin	100	24	24	24	24	24	50	24	25	24	-
Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	Izin	10	10	10	10	10	10	20	10	11	10	-
Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	Trayek	35	35	0	35	0	35	0	35	35	35	-

Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan (DINAS PERHUBUNGAN)	Angka	100	100	79.22	100	79.68	100	95.52	100	95.75	100	-
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peringkat	69	72.32	72.32	72.4	71.28	72.7	70.11	75	-	75.5	-
Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	20	30	30	32	32	35	35	38	38	40	-
Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	%	30	35	35	40	40	45	45	50	50	60	-
Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	70	80	80	85	85	90	90	95	95	100	-

Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	%	5	25	25	30	30	35	35	40	40	50	50	-
Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	10	10	10	15	15	20	20	25	25	30	30	-

B. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dishub Prov. Kaltim Tahun Tahun Berjalan 2019-2022 (TC.23) dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja SKPD	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023	
				Target	Realisasi								
1	Prosentase pergerakan sarana transportasi darat, laut dan udara	%	25	30	31,55	32	17	33	20	34	33.74	35	-
2	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	50	50	50,49	60	68,63	70	89.49	80	95.81	85	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100	100	79.22	100	79.68	100	84.80	100	85.48	100	-

2.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi (2016-2020) berfungsi mengukur persepsi masyarakat Kalimantan Timur terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Timur. Metode pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi dititik beratkan pada pola layanan 7 Terminal Type B se- Kalimantan Timur dengan menggunakan pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survey Kepuasan dengan variable IKM sebagai berikut :

- 1). Persyaratan pelayanan;
- 2). sistem, mekanisme dan prosedur,
- 3). Waktu penyelesaian,
- 4). Biaya/tarif,
- 5). Produk spesifikasi jenis pelayanan,
- 6). Kompetensi pelaksana,
- 7). Perilaku pelaksana,
- 8). Sarana dan prasarana,
- 9). penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan hasil IKM pertahun sebagai berikut :

1). Tahun 2018 : 76,60

2). Tahun 2019 : 79,22

3). Tahun 2020 : 79,68

4). Tahun 2021 : 80,21

5). Tahun 2022 : 81,08

Trend Indeks Layanan Transportasi cenderung mengalami peningkatan dikarenakan adanya komitmen dari para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan/kebijakan seiring dengan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Khusus untuk Tahun 2020 variabel unsur pelayanan yang dinilai adalah persyaratan pelayanan, system mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, produk spesifikasi jenis pelayananan. (Sumber : Hasil survey SKM Dishub, 2020).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode 2018 s/d 2022

No.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	76,06	79,22	79,68	80,21	81,08

Sumber : Dishub Prov. Kaltim

Dari tabel diatas dapat diketahui Sistem Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Timur dengan populasi 140 orang dan sampel 103

orang responden secara acak (tabel kreji dan Morgan), dari hasil tersebut setelah diolah data mendapatkan nilai 81,08% (B) dengan kategori Baik.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode 2023 s/d 2026

No.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	82,00	83,00	84,00	85,00

Sumber :Dishub Prov. Kaltim

2.3.3. Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi (Sasaran Strategis I RENSTRA (2019 – 2023))

Pergerakan sarana transportasi yang ada pada wilayah Kalimantan Timur Tahun 2022 mengalami sedikit perbaikan dari tahun 2021, baik transportasi darat, laut maupun udara hal ini dikarenakan kebijakan PPKM pada sektor transportasi yang dampaknya secara signifikan meningkatkan Pergerakan Sarana Transportasi dan adanya peraturan/kebijakan protokol kesehatan di Transportasi Umum jumlah pergerakan sarana sudah mulai mulai berangsur longgar dan sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Hal demikian dapat dilihat dari realisasi capaian persentase pergerakan sarana transportasi yang hampir menacapai target capaian yang ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	34	33,74	99,24

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2021
			2021	2022	
1	2	3	4	5	$6=((5/4)-1)*100$
1.	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	20%	33,74%	68,7%

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pergerakan sarana transportasi mengalami peningkatan dari tahun 2021, kenaikan ini cukup signifikan seiring PPKM yang berangsur-angsur longgar sehingga aktivitas masyarakat kian membaik dan kembali normal.

I. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis I (Pertama)

1. Pembangunan fasilitas Pelabuhan/Dermaga.

Potensi industri maritim di Kaltim memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat pada sektor perikanan, pertanian dan sektor pariwisata. Dengan potensi yang dimiliki Kaltim saat ini harus didukung dengan sistem transportasi yang handal seperti peningkatan infrastruktur transportasi laut, pembangunan dan pemeliharaan kapal pelabuhan barang, pembangunan tol laut guna penyerataan harga komoditas, menghilangkan pungli di pelabuhan, serta konektivitas sistem transportasi. Tahun 2021 upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam peningkatan infrastruktur pelabuhan, dermaga dan penyeberangan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy;
- Perbaikan Jalan Akses Masuk dan Keluar Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan;
- Pembinaan Badan usaha;
- Pemeriksaan Keselamatan Pelayaran;
- Sosialisasi dan Forum Keselamatan Pelayaran.

2. Hasil Survei Indikator Kepuasan layanan Infrastruktur Transportasi dan Survei Kepuasan Masyarakat di sektor Perhubungan.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Terminal Tipe B) memiliki Nilai 81,08 dengan kategori Baik.

II. Alternatif Solusi/ Upaya Dalam Meningkatkan Persentase Pergerakan sarana Transportasi.

- ### 1. Upaya dalam mempertahankan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima pada sektor transportasi diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan

pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif;

2. Peningkatan kualitas atau pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna sarana transportasi pada terminal, pelabuhan, dermaga, dan bandar udara (WC Umum yang terpisah antara pria dan wanita maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum);
3. Melakukan pengintegrasian antar stake holder perhubungan terkait dengan monitoring pergerakan Sarana Transportasi secara berkala sebagai upaya monitoring dan evaluasi dalam untuk meningkatkan ekonomi Kaltim;
4. Pemberlakuan dan sosialisasi yang rutin tentang Protokol Kesehatan yang ketat di semua sektor transportasi.

III. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Program Pengelolaan Pelayaran

1. Kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan;
2. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas;
4. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

b. Program Pengelolaan Perkeretaapian:

1. Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

c. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):

1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (UPTD Terminal);
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Dishub);
3. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dishub).

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
1	Program Pengelolaan Pelayaran		Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	87%	85%	97.70%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASD	Izin	250	107	41.80%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	Dokumen	1	1	100%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	Izin	100	88	88%	Kabid Pelayaran	APBD
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	%	97%	97%	100%	Kabid Pelayaran	APBD
2	Program Pengelolaan Perkeretaapian		Prosentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	%	50	50	100%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD
		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Lintasan/Trase Kereta Api	Penetapan	1	0	0%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD

3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	427	195	45.66%	Kabid LLAJ	APBD
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	Orang	700000	377969	54%	Kepala UPTD	APBD
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe B	Perencanaan	5	5	100%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	Penetapan	1	0	0%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksebilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	99.24	91.66	7.58

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai 7,58%.

2.3.4. Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (Sasaran Strategis II RENSTRA 2019-2023)

Hasil dari pengukuran capaian sasaran strategis II memiliki realisasi 123,14% dimana hasil tersebut melebihi hasil dari target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis Tahun 2019 – 2023.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	Persentase (%)	80	98,51	123,14

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2020
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6=((5/4)-1)*100
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	%	89.49%	98.51%	10.08%

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis II (Kedua)

1. Hasil Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor / Rampcheck (Angkutan Orang dan Barang).

Kendaraan yang Diperiksa	Tahun		
	2021	2022	Akhir RPJMD
Angkutan Umum	203	102	250
Angkutan Barang	385	357	400
Jumlah	588	459	650
Persentase		70,61%	

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah kendaraan yang telah dilakukan rampcheck (pemeriksaan kelaikan) berjumlah 102 kendaraan jenis angkutan umum dan 357 kendaraan jenis angkutan barang. Diketahui total hasil kendaraan yang telah di rampcheck pada tahun 2022 berjumlah 459 kendaraan dan bila disandingkan dengan target akhir tahun (RPJMD) mendapat persentase sebesar 70.61%.

2. Jumlah Prasarana Keselamatan Jalan yang Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi

Salah satu indikator penunjang keberhasilan capaian sasaran strategis 2 adalah kegiatan pemasangan prasarana keselamatan jalan di ruas jalan provinsi, adapun jumlah prasarana keselamatan jalan yang terpasang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Jenis Prasarana	Tahun			
	Awal 2021	2022	Jumlah Terpasang Data Awal 2021+ 2022	Akhir RPJMD (2023)
Rambu	5.880	105	5.985	16.000
Marka	291.635	50.008	341.643	2.237.725
Pagar	5.628	-	5.628	89.509
LPJU	35	62	97	235
Persentase	12,93%		25,06%	100%

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa prasarana keselamatan jalan yang terpasang Pada Tahun 2022 untuk rambu berjumlah 105 unit, Marka jalan 50.008 m², LPJU 62 unit. Sehingga jika disandingkan dengan target capaian hasil tahun terakhir RPJMD (Tahun 2023) mencapai 25,06%.

3. Prasarana Kelengkapan Terminal Tipe B (Indikator Penilaian WTN)

Kab/Kota berpredikat WTN (Wahana Tata Nugraha), merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem transportasi di wilayah Kab/Kota, salah satu penilaian WTN adalah penilaian terkait dengan prasarana kelengkapan pada Terminal Tipe B yang ada di Kalimantan Timur, adapun penilaiannya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Angka Penilaian WTN pada Terminal Tipe B

PRASARANA TERMINAL	TAHUN
	2022
Batu Ampar	83
Sungai Kunjang	83
Lempake	83
Timbau	77
Penajam	62
Paser	58
Bontang	62
Sangatta	45
Berau	68
Persentase	69%

4. Penurunan Jumlah Angka Kecelakaan

Pada 3 (tiga) tahun terakhir, rata-rata angka kasus laka lantas di beberapa Kab/Kota mengalami penurunan, dengan rekapitulasi sebagai berikut.

No	Kesatuan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Polresta Samarinda	225	170	109	96	87	78
2	Polres Balikpapan	179	132	88	47	56	26
3	Polres Bontang	76	92	55	56	31	20

4	Polres Kukar	296	152	40	77	78	28
5	Polres Kutim	59	50	34	23	19	6
6	Polres Kubar	55	48	103	22	29	9
7	Polres Berau	85	100	27	55	23	9
8	Polres Paser	149	80	71	41	53	0
9	Polres PPU	69	44	43	31	42	19
	JUMLAH	1.193	868	570	448	418	195

I. Alternatif Solusi/Upaya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan.

1. Mengkaji kembali jumlah kebutuhan sarana prasarana keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi dan lokasi rawan kecelakaan sesuai dengan kebutuhan, guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
2. Meningkatkan kembali kegiatan inspeksi keselamatan angkutan umum dan angkutan barang secara rutin dan berjenjang, guna mengurangi tingkat pelanggaran over dimensi dan overloading dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten.
3. Peningkatan nilai capaian Wahana Tata Nugraha melalui:
 - a) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan nilai capaian WTN;
 - b) Mengkaji kembali kebutuhan sarana prasarana kelaikan transportasi darat.

II. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
3. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi;
4. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1(Satu) Daerah Provinsi;

5. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1(Satu) Daerah Provinsi;
6. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
7. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi;
8. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Antar kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 2 adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Jumlah Lakalantas	Kasus	427	195	154.33%	Kabid LLAJ	APBD
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	%	70	75.23%	107.47%	Kabid LLAJ	APBD
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	%	85	47.36	55.71%	Kabid LLAJ	APBD
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Izin andalalin yang di Keluarkan	Izin Andalalin	20	20	100%	Kabid LLAJ	APBD
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	%	75	75	100%	Kabid LLAJ	APBD
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	Penetapan	1	0	0%	Kabid LLAJ	APBD
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang Dikeluarkan	Izin	24	25	104.17%	Kabid LLAJ	APBD

	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	Izin	10	11	110%	Kabid LLAJ	APBD
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jalan Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	Trayek	35	35	100%	Kabid LLAJ	APBD

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	123,14	91,56	31,58

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai 31.58 %.

2.3.5. Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (Sasaran Strategis III RENSTRA 2019-2023)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Angka	100	85,48	85,48

Hasil dari pengukuran capaian sasaran strategis III memiliki realisasi 85.48.

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan perbandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 (tiga) Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2021
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6=((5/4)-1)*100
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	%	84,80%	85,48%	0,80%

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil capaian sasaran 3 (Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya memiliki hasil peningkatan 0,80%.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis III (Ketiga)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan).

1. Hasil Survei Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi dan Survei Kepuasan Masyarakat di sektor Perhubungan.

No.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi				
	Tahun 2018 (IKLI)	Tahun 2019 (SKM)	Tahun 2020 (SKM)	Tahun 2021 (SKM)	Tahun 2022 (SKM)
1.	76,6	79,22	79,68	80,21	81,08

Hasil SKM Tahun 2022

1. Terminal Sungai Kunjang memiliki nilai : 81,63
2. Terminal Lempake memiliki nilai : 81,03
3. Terminal Bontang memiliki nilai : 81,72
4. Terminal Sangatta memiliki nilai : 80,71
5. Terminal Tenggarong memiliki nilai : 80,74
6. Terminal Paser memiliki nilai : 80,83
7. Terminal Berau memiliki nilai : 80,95

Jika secara keseluruhan dirata-ratakan maka Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (UPTD Terminal Tipe B) memiliki Nilai **81,08 dengan kategori Baik.**

Dari tabel dan capaian SKM di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 masyarakat di Kalimantan Timur melalui tim penyusun dan penilai Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Kaltim dapat diketahui bahwa pelayanan infrastruktur perhubungan dinilai sangat baik karena mencapai target kerja yaitu 76.6 sedangkan mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Prov kaltim menggunakan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat

yang dilaksanakan pada 7 (Tujuh) Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Timur dengan populasi masing-masing 140 orang dan sampel 103 orang responden secara acak (tabel kreji dan Morgan), dari hasil tersebut diolah data yang sehingga mendapatkan nilai **81,08 (B)**.

2. Hasil Survei Indikator Kepuasan layanan dan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan standar pelayanan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Selain melakukan survei kepuasan masyarakat pada Terminal Tipe B Prov. Kaltim, survei kepuasan masyarakat juga dilakukan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim (terkait pelayanan), antara lain:

- Layanan izin penyelenggaraan angkutan orang
- Layanan perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan orang
- Layanan perpanjangan kartu pengawasan (KP)
- Layanan peremajaan/penggantian dan penambahan kendaraan
- Layanan penerbitan surat keputusan persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)
- Layanan penerbitan surat izin usaha perusahaan bongkar muat (SIUPBM)
- Layanan penerbitan surat izin usaha jasa pengurusan transportasi (SIUJPT)
- Layanan izin pengoperasian angkutan khusus sungai dan danau
- Layanan izin pengoperasian angkutan penyeberangan
- Layanan kartu pengawasan izin trayek ASDP

Hasil IKLI dan SKM Pada Dinas Perhubungan

No	Indeks Kepuasan Layanan sesuai standar pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	
	IKM TAHUN 2021	IKM TAHUN 2022
NILAI IKM	95.52	95.75

Untuk mencapai capaian sasaran strategis 3 dinas perhubungan membagi bobot Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70% untuk IKM UPTD Terminal dan 30% untuk IKM Dinas Perhubungan sehingga diperoleh hasil capaian realisasi tingkat kemajuan sebesar **85,48** dari target **100**.

I. Alternatif Solusi/ Upaya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan atau sarana dan prasarana yang ada di setiap Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Prov. Kaltim seperti Kamar Mandi (WC Umum) yang terpisah antara pria dan wanita maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum;
2. Perlu adanya peningkatan penyusunan survei kepuasan masyarakat dengan atau bekerja sama dengan pihak lain yang dianggap matang atau lebih berpengalaman agar pengolahan data yang didapat bisa lebih akurat dan lebih matang dengan demikian maka dapat membantu instansi Dinas Perhubungan Prov Kaltim Khususnya UPTD Terminal Tipe B dalam meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan.

II. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 3 adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
Dinas Perhubungan									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	%	100	95,75	95,75%	Sekretaris	APBD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	75	73,05	97,40%	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100%	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	38	38	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	%	50	50	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	95	95	100%	Kasubbag Umum	APBD

UPTD Terminal									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	%	100	81,08	81,08%	Kepala UPTD Terminal	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Tata Usaha	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	%	25	12,5	50%	Kasubbag Tata Usaha	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Tata Usaha	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	25	25	100%	Kasubbag Tata Usaha	APBD

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	85,48	88,18	-2,7

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai -2,7 %.

2.3.6 Capaian Tujuan Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja tujuan pada RPJMD Tahun 2018-2023 di Tahun 2022 dapat melebihi Target Indikator Tujuan.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2021
1.	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton)	6.000.000 Orang dan 337.000.000 Ton	8.513.323 Orang dan 513.031.229 Ton

2.3.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan, pada level program selanjutnya, kinerja dinas di analisa pengelolaan pendanaan pelayanan dinas melalui Renstra Dinas periode perencanaan sebelumnya Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. (TC.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (2019-2023)

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22,176,256,226	24,566,657,510	30,504,412,600	25,383,422,694	22,176,256,226	24,566,657,510	27,164,069,670	22,317,564,662	100.00%	100.00%	89.05%	87.92%	6.05%	1.17%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	705,082,650	1,390,503,686	1,169,533,800	782,468,500	705,082,650	1,390,503,686	1,124,248,189	750,887,448	100.00%	100.00%	96.13%	95.96%	16.07%	14.95%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,581,154,642	14,106,413,676	17,160,759,824	16,044,902,049	13,581,154,642	14,106,413,676	14,738,638,120	13,603,062,115	100.00%	100.00%	85.89%	84.78%	6.34%	0.21%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,276,668,544	315,388,413	753,000,000	206,475,000	1,276,668,544	315,388,413	539,289,413	203,127,751	100.00%	100.00%	71.62%	98.38%	-3.04%	-22.21%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,698,665,419	1,791,785,503	1,571,020,000	1,853,157,000	2,698,665,419	1,791,785,503	1,520,654,271	1,846,701,739	100.00%	100.00%	96.79%	99.65%	-9.32%	-9.10%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,124,081,500	1,537,111,600	391,958,500	999,639,800	1,124,081,500	1,537,111,600	373,429,000	910,739,520	100.00%	100.00%	95.27%	91.11%	39.09%	34.97%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,851,199,417	4,750,685,182	5,696,265,976	4,216,268,155	1,851,199,417	4,750,685,182	5,386,643,585	3,834,147,089	100.00%	100.00%	94.56%	90.94%	50.18%	47.06%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939,404,054	674,769,450	3,761,874,500	1,280,512,190	939,404,054	674,769,450	3,481,167,092	1,168,899,000	100.00%	100.00%	92.54%	91.28%	121.12%	107.10%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11,842,880,567	6,985,828,303	15,524,035,275	14,634,422,056	11,842,880,567	6,985,828,303	13,607,106,951	13,615,817,387	100.00%	100.00%	87.65%	93.04%	25.16%	17.94%
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5,560,983,650	5,575,782,700	12,472,569,175	8,861,547,066	5,560,983,650	5,575,782,700	11,152,432,285	8,333,432,207	100.00%	100.00%	89.42%	94.04%	31.67%	25.00%
2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	526,859,649	940,080,225	1,000,000,000	1,530,650,000	526,859,649	940,080,225	900,410,830	1,425,420,538	100.00%	100.00%	90.04%	93.13%	45.96%	44.17%
2.3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-	-	1,632,410,000	-	-	-	1,496,567,652	-	-	-	91.68%		
2.4	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-	-	-	81,750,000	-	-	-	78,052,900	-	-	-	95.48%		
2.5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	989,414,701	333,612,300	846,000,000	586,758,000	989,414,701	333,612,300	617,326,460	566,229,942	100.00%	100.00%	72.97%	96.50%	18.89%	3.49%
2.6	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4,175,267,804	87,254,078	455,999,900	98,332,000	4,175,267,804	87,254,078	407,096,488	89,846,009	100.00%	100.00%	89.28%	91.37%	82.09%	63.57%
2.7	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	817,606,000	-	-	-	709,225,440	-	-	-	86.74%		
2.8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	579,823,263	-	533,313,700	545,528,990	579,823,263	-	344,356,900	502,459,131	100.00%	-	64.57%	92.10%	-48.85%	-27.04%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.9	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10,531,500	49,099,000	216,152,500	228,800,000	10,531,500	49,099,000	185,483,988	218,668,568	100.00%	100.00%	85.81%	95.57%	237.43%	220.63%
2.10	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	251,040,000	-	-	-	195,915,000	-	-	-	78.04%		
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2,498,922,280	617,900,036	12,124,942,825	3,390,803,000	2,498,922,280	617,900,036	7,319,264,313	3,090,171,936	100.00%	100.00%	60.37%	91.13%	571.66%	317.16%
3.1	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	521,328,983	103,952,775	750,000,000	625,370,000	521,328,983	103,952,775	669,150,250	617,867,024	100.00%	100.00%	89.22%	98.80%	174.93%	151.99%
3.2	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	722,508,000	-	-	-	647,613,070	-	-	-	89.63%		
3.3	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	153,355,800	370,379,825	332,000,000	424,800,000	153,355,800	370,379,825	300,694,000	421,839,210	100.00%	100.00%	90.57%	99.30%	53.04%	54.33%
3.4	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1,213,654,997	143,567,436	10,314,317,825	1,618,125,000	1,213,654,997	143,567,436	5,719,990,433	1,402,852,632	100.00%	100.00%	55.46%	86.70%	2303.94%	1240.18%
3.5	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	610,582,500		728,625,000	-	610,582,500		629,429,630	-	100.00%		86.39%			
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	3,916,217,841	3,743,158,790	499,052,300	396,237,000	3,916,217,841	3,743,158,790	128,058,658	381,143,479	100.00%	100.00%	25.66%	96.19%	-37.23%	32.21%
4.1	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3,916,217,841	3,743,158,790	499,052,300	396,237,000	3,916,217,841	3,743,158,790	128,058,658	381,143,479	100.00%	100.00%	25.66%	96.19%	-37.23%	32.21%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,477,721,351	2,149,716,105	2,256,359,734	3,082,135,205	1,477,721,351	2,149,716,105	2,119,307,282	2,783,899,127	100.00%	100.00%	93.93%	90.32%	29.01%	25.14%
5.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198,070,075	139,833,700	254,355,000	434,101,707	198,070,075	139,833,700	233,843,660	424,801,197	100.00%	100.00%	91.94%	97.86%	41.05%	39.83%
5.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,845,750	316,470,400	151,840,000	179,865,000	14,845,750	316,470,400	145,179,900	110,525,500	100.00%	100.00%	95.61%	61.45%	666.05%	651.24%
5.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	873,891,926	1,693,412,005	1,820,164,734	2,236,764,248	873,891,926	1,693,412,005	1,716,163,472	2,036,760,160	100.00%	100.00%	94.29%	91.06%	41.38%	37.93%
5.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390,913,600	-	30,000,000	231,404,250	390,913,600	-	24,120,250	211,812,270	100.00%	-	80.40%	91.53%	285.67%	339.08%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1,016,718,500	89,807,600	1,783,640,266	4,152,247,706	1,016,718,500	89,807,600	1,497,423,994	3,585,436,029	100.00%	100.00%	83.95%	86.35%	642.57%	538.55%
6.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1,016,718,500	89,807,600	1,783,640,266	4,152,247,706	1,016,718,500	89,807,600	1,497,423,994	3,585,436,029	100.00%	100.00%	83.95%	86.35%	642.57%	538.55%
	Jumlah	42,928,716,765	38,153,068,344	62,692,443,000	51,039,267,661	42,928,716,765	38,153,068,344	51,835,230,868	45,774,032,620	100.00%	100.00%	82.68%	89.68%	-18.59%	-11.69%

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (2021 – 2022)**

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PERHUBUNGAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.504.412.600,-	27.140.800.460,-	88.97	25.383.422.694,-	22.317.564.662,-	87.92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.169.533.800,-	1.124.248.189,-	96.13	782.468.500,-	750.887.448,-	95.96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	401.200.000,-	378.186.092,-	94.26	370.043.500,-	369.676.880,-	99.90
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	374.333.800,-	365.235.772,-	97.57	31.534.500,-	26.652.000,-	84.52
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	234.300.000,-	227.836.625,-	97.24	211.083.500,-	206.178.500,-	97.68
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.700.000,-	152.989.700,-	95.8	169.807.000,-	148.380.068,-	87.38
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.160.759.824,-	14.738.638.120,-	85.89	16.044.902.049,-	13.603.062.115,-	84.78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.160.759.824,-	14.738.638.120,-	85.89	16.044.902.049,-	13.603.062.115,-	84.78

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	753.000.000,-	539.289.413,-	71.62	206.475.000,-	203.127.751,-	98.38
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	343.750.000,-	333.332.550,-	96.97	132.675.000,-	130.500.000,-	98.36
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	409.250.000,-	192.049.863,-	50.33	73.800.000,-	72.627.751,-	98.41
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.571.020.000,-	1.520.654.271,-	96.79	1.853.157.000,-	1.846.701.739,-	99.65
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.000.000,-	23.960.500,-	99.84	49.997.500,-	49.870.000,-	99,74
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.600.000,-	69.514.250,-	99.88	180.000.000,-	179.500.000,-	99.72
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	177.420.000,-	177.395.325,-	99.99	200.077.500,-	200.064.850,-	99.99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.300.000.000,-	1.249.784.196,-	96.14	1.423.082.000,-	1.417.266.889,-	99.59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391.958.500,-	373.429.000,-	95.27	999.639.800,-	910.739.520,-	91.11

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.558.500,-	116.480.000,-	88.54	342.000.000,-	307.400.000,-	89.88
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.400.000,-	256.949.000,-	98.67	657.639.800,-	603.339.520,-	91.74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.696.265.976,-	5.386.643.585,-	94.56	4.216.268.155,-	3.834.147.089,-	90.94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.280.000,-	8.935.550,-	35.35	13.160.000,-	10.679.800,-	81.15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.164.770.200,-	2.926.218.534,-	92.46	796.816.969,-	624.939.126,-	78.43
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.506.215.776,-	2.451.489.501,-	97.82	3.406.291.186,-	3.198.528.163,-	93.90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.761.874.500,-	3.481.167.092	92.54	1.280.512.190,-	1.168.899.000,-	91.28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.545.000,-	73.855.000,-	99.07	120.280.000,-	117.594.750,-	97.77

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.046.500,-	103.721.000,-	89.38	263.977.300,-	253.507.300,-	96.03
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	385.424.000,-	384.687.000,-	99.81	204.350.000,-	204.241.200,-	99.95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.185.859.000,-	2.918.904.092,-	91.62	691.904.890,-	593.555.750,-	85.79
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.524.035.275,-	13.607.106.951,-	87.65	14.634.422.056,-	13.615.817.387,-	93.04
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	12.472.569.175,-	11.152.432.285,-	89.42	8.861.547.066,-	8.333.432.207,-	94.04
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	12.272.569.175,-	10.991.568.385,-	89.56	7.098.494.066,-	6.756.576.989,-	95.18
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	200.000.000,-	160.863.900,-	80,43	1.763.053.000,-	1.576.855.218,-	89.44
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1.000.000.000,-	900.410.830,-	90.04	1.530.650.000,-	1.425.420.538,-	93.13
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1.000.000.000,-	900.410.830,-	90.04	1.530.650.000,-	1.425.420.538,-	93.13

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-	-	1.632.410.000,-	1.496.567.652,-	91.68
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-	-	76.900.000,-	74.028.545,-	96.27
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	-	-	-	1.555.510.000,-	1.422.539.107,-	91.45
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-	-	-	81.750.000,-	78.052.900,-	95.48
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	-	-	-	81.750.000,-	78.052.900,-	95.48
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	846.000.000,-	617.326.460,-	72.97	586.758.000,-	566.229.942,-	96.50
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000,-	20.990.000,-	83.96	75.805.000,-	73.695.880,-	97.22
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	50.750.000,-	50.136.800,-	98.79	79.100.000,-	79.047.380,-	99.93

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	202.000.000,-	95.394.600,-	47.23	205.036.000,-	203.453.870,-	99.23
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	568.250.000,-	450.805.060,-	79,33	226.817.000,-	210.032.812,-	92.60
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	455.999.900,-	407.096.468,-	89,28	98.332.000,-	89.846.009,-	91.37
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	455.999.900,-	407.096.468,-	89,28	98.332.000,-	89.846.009,-	91.37
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	817.606.000,-	709.225.440,-	86.74
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-	-	-	693.330.000,-	615.939.000,-	88.84
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-	-	-	124.276.000,-	93.286.440,-	75.06

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	533.313.700,-	344.356.900,-	64.57	545.528.990,-	502.459.131,-	92.10
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	71.958.700,-	70.400.000,-	97.83	286.502.000,-	272.939.685,-	95.27
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	461.355.000,-	273.956.900,-	59.38	259.026.990,-	229.519.446,-	88.61
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	216.152.500,-	185.483.988,-	85,81	228.800.000,-	218.668.568,-	95.57
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25.000.000,-	18.240.000,-	72.96	81.700.000,-	79.996.947,-	97.92
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	191.152.500,-	167.243.988,-	87.49	147.100.000,-	138.671.621,-	94.27

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	251.040.000,-	195.915.000,-	78.04
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	251.040.000,-	195.915.000,-	78.04
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	12.124.942.825,-	7.319.264.313,-	60.37	3.390.803.000,-	3.090.171.936,-	91.13
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	750.000.000,-	669.150.250,-	89.22	625.370.000,-	617.867.024,-	98.80
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	393.650.000,-	371.359.750,-	94.34	149.917.000,-	148.421.413,-	99.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	356.350.000,-	297.790.500,-	83.57	475.453.000,-	469.445.611,-	98.74

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	722.508.000,-	647.613.070,-	89.63
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	-	722.508.000,-	647.613.070,-	89.63
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	332.000.000,-	300.694.000,-	90.57	424.800.000,-	421.839.210,-	99.30
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64.900.000,-	64.156.400,-	98,85	188.600.000,-	187.666.390,-	99.50

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	267.100.000,-	236.537.600,-	88.56	236.200.000,-	234.172.820,-	99.14
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.314.317.825,-	5.719.990.433,-	55.46	1.618.125.000,-	1.402.852.632,-	86.70
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6.333.079.825,-	2.561.643.818,-	40.45	1.618.125.000,-	1.402.852.632,-	86.70
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	3.981.238.000,-	3.158.346.615,-	79.33	-	-	-
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	728.625.000,-	629.429.630,-	86.39	-	-	-
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	728.625.000,-	629.429.630,-	86.39	-	-	-

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pembangunan, Penerbitan Izin dan Pembangunan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.314.317.825,-	5.719.990.433,-	55.46	1.618.125.000,-	1.402.852.632,-	86.70
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6.333.079.825,-	2.561.643.818,-	40.45	1.618.125.000,-	1.402.852.632,-	86.70
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	3.981.238.000,-	3.158.346.615,-	79.33	-	-	-
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	728.625.000,-	629.429.630,-	86.39	-	-	-
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	728.625.000,-	629.429.630,-	86.39	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	499.052.300,-	128.058.658,-	25.66	396.237.000,-	381.143.479,-	96.19
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	499.052.300,-	128.058.658,-	25.66	396.237.000,-	381.143.479,-	96.19
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	409.634.300,-	45.576.555,-	11.13	186.743.000,-	177.569.196,-	95.09
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	89.418.000,-	82.482.103,-	92.24	209.494.000,-	203.574.283,-	97.17
JUMLAH	58.652.443.000,-	48.218.499.592,-	82.21	43.804.884.750,-	39.404.697.464	89.96

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
UPTD TERMINAL						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.256.359.734,-	2.119.307.282,-	93.93	3.082.135.205,-	2.783.899.127,-	90.32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.355.000,-	233.843.660,-	91.94	434.101.707,-	424.801.197,-	97.86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.800.000,-	5.610.500,-	71.93	58.385.207,-	57.485.000,-	98.46
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,-	16.323.750,-	90.69	26.965.000,-	26.812.650,-	99.44
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.555.000,-	43.013.750,-	98.76	82.303.500,-	75.083.500,-	91.23
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.000.000,-	168.895.660,-	91.29	266.448.000,-	265.420.047,-	99.61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.840.000,-	145.179.900,-	95.61	179.865.000,-	110.525.500,-	61.45
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.000.000,-	95.366.000,-	96.33	63.124.000,-	-	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.840.000,-	49.813.900,-	96.65	116.741.000,-	110.525.500,-	94.68
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.820.164.734,-	1.716.163.472,-	94.29	2.236.764.248,-	2.036.760.160,-	91.06
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000,-	1.350.000,-	69.23	10.760.000,-	6.060.200,-	56.32

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.800.000,-	75.160.854,-	61.71	226.507.140,-	80.345.190,-	35.47
Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	1.696.414.734,-	1.639.652.618,-	96.65	1.999.497.108,-	1.950.354.770,-	97.54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,-	24.120.250,-	80.40	231.404.250,-	211.812.270,-	91.53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	15.794.250,-	5.147.270,-	32.59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,-	24.120.250,-	80.40	215.610.000,-	206.665.000,-	95.85
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.783.640.266,-	1.497.423.994,-	83.95	4.152.247.706,-	3.585.436.029,-	86.35
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1.783.640.266,-	1.497.423.994,-	83.95	4.152.247.706,-	3.585.436.029,-	86.35
Pembangunan Gedung Terminal	574.765.266,-	525.113.200,-	91.36	900.386.090,-	798.356.333,-	88.67

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	1.208.875.000,-	972.310.794,-	80.43	3.251.861.616,-	2.787.079.696,-	85.71
Jumlah II	4.040.000.000,-	3.616.731.276,-	89.52	7.234.382.911,-	6.369.335.156,-	88.04
Jumlah I + II	62.692.443.000,-	51.835.230.868,-	82.68	51.039.267.661	45.774.032.620	89.68

No	Program / Kegiatan	Indikator	Target Realisasi 1 Tahun	Persentase Capaian	Realisasi Kinerja (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100%	95,75%	95,75%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Hasil Evaluasi Sistem AKIP	75%	73,05%	97,40%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan; Renja (2 Dokumen), SKM (2 Dokumen), Studi Gender Statistik (1 Dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran; RKA (1 Dokumen), DPA (1 Dokumen), Laporan Rakornis (1 Dokumen), Laporan Forum PD (1 Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD; Laporan Monev (2 Dokumen), Laporan TEPR (12 Dokumen), Laporan Angkutan Lebaran (1 Dokumen), Laporan Natal dan Tahun Baru (1 Dokumen)	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (4 Triwulan)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	38%	38%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Dishub beserta Perlengkapannya	145 Stel	145 Stel	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Kualifikasi ASN Perhubungan	65 Pegawai	65 Pegawai	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	434 Unit	434 Unit	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	180 Paket	180 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	200000 Lembar	200000 Lembar	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	65 Kali	65 Kali	100%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	50%	50%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	72 Unit	72 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	5300 Surat	5300 Surat	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	95%	95%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	4 Unit	4 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	20 Unit	20 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157 Unit	157 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	427 kasus	195 kasus	154,33%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	70%	75,23%	107,47%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120 Km	120 Km	100%
		Terpasangnya LPJU Solar Sell di Jalan Provinsi	61 Buah	62 Buah	102%
		Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	105 Buah	105 Buah	100%
		Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi (ABT)	50008 Meter	50008 Meter	100%
		Terpasangnya Paku Jalan di Jalan Provinsi (ABT)	5014 Buah	5014 Buah	100%
		Pengadaan Drone (ABT)	1 Set	1 Set	100%
		Pengadaan HT (ABT)	10 Unit	10 Unit	100%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara berupa Rambu Jalan/Pagar Pengaman Jalan/Marka Jalan,	8030 Meter	8030 Meter	100%
		Operasional CCTV	2 Bulan	2 Bulan	100%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	5 Perencanaan	5 Perencanaan	100%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	85%	47,36%	55,71%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi MRLL yang dikeluarkan	10 Rekomendasi	4 Rekomendasi	40%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Jalan Provinsi	7 Lokasi	5 Lokasi	71,43%

	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	20 Izin Andalalin	20 Izin Andalalin	100%
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Kegiatan Pengawasan Andalalin	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	75%	75%	100%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2 unit	2 unit	100%
		Laporan Audit PKB	1 Terminal	1 Laporan	100%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang Memenuhi Standar Kelaikan	7 Terminal	7 Terminal	100%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30 Pengemudi	30 Pengemudi	100%
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	100%
		Jumlah Forum dan Sosialisasi Keselamatan LLAJ	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	1 Penetapan	0 Penetapan	0%
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100%
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	1 Penetapan	0 Penetapan	0%
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Kajian Akademis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi dan uji coba	200 Orang	200 Orang	100%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24 Izin	25 Izin	104,17%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	24 Izin	25 Izin	104,17%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	- Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24 Badan Usaha	25 Badan Usaha	104,17%
		- Pemilihan Abdiyasa Teladan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		- Pemilihan Wahana Tata Nugraha	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10 Surat Izin	11 Surat Izin	110%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	10 Surat Izin	11 Surat Izin	110%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	40 Badan Usaha	13 Badan Usaha	32,50%
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	35 Trayek	35 Trayek	100%
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen analisis yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87%	85%	97,70%
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	250 Izin	107 Izin	42,80%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	250 Izin	107 Izin	42,80%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	- Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	75 Badan Usaha	69 Badan Usaha	92%
		- Jumlah Kapal yang di Rampcheck	50 Unit Kapal	39 Unit Kapal	78%
		- Jumlah Pengadaan Alat Keselamatan (APAR)	51 Buah	51 Buah	100%
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	88 Izin	88%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Diproses Tepat Waktu	50 Izin	88 Izin	176%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Dibina	150 Badan Usaha	153 Badan Usaha	102%

	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	97%	97%	100%
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Studi Kepelabuhanan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	50%	50%	100%
	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Lintasan/Trase Kereta Api	1 Penetapan	0 Penetapan	0%
	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana yang di Sosialisasikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

No	Program / Kegiatan	Indikator	Target Realisasi 1 Tahun	Persentase Capaian	Realisasi Kinerja (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100%	81,08%	81,08%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Unit	60 Unit	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	124000 Eksemplar	131977 Eksemplar	106,43%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	10 Kali	23 Kali	230%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	40%	20%	50%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	0 Unit	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	12 Unit	12 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Administrasikan	25 Surat	20 Surat	80%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum (Kebersihan) Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	25%	25%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	5 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	7 Unit	7 Unit	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	427 kasus	195 kasus	154,33%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	umlah Penumpang Terminal yang Terlayani	700000 Orang	377969 Orang	54%
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarpras Terminal Tipe B yang Dikembangkan	5 Terminal	5 Terminal	100%

Catatan :

Pada periode 2019-2022 terdapat perubahan Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Semula (kurun waktu 2019 – 2020) :

- a. Jumlah Program : 4 Program
- b. Jumlah Kegiatan : 11 Kegiatan

2. Menjadi (kurun waktu 2021 – 2022) :

- a. Jumlah Program : 4 Program
- b. Jumlah Kegiatan : 22 Kegiatan
- c. Jumlah Sub Kegiatan : 49 Sub Kegiatan

Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Prov. Kaltim selama periode 2019 – 2020 adalah 53,98% pada tahun 2019 dan 90,06% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 82,68% dan pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 89,68%. Realisasi cukup baik dicapai oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dimana pendanaan pada program prioritas yang merupakan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan perlengkapan jalan menjadi faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran, permasalahan pekerjaan fisik di lapangan sangat mempengaruhi daya serap anggaran sehingga diperlukan manajemen proyek yang baik untuk dapat meningkatkan daya serap anggaran.

Realisasi anggaran pada program – program bersifat kontrak atau pihak ketiga masih perlu menjadi perhatian untuk dapat meningkatkannya, KPA dan PPTK mempunyai peran penting untuk dapat merencanakan dan merealisasikan dengan baik kegiatannya sesuai target realisasi yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan agar dapat ditindaklanjuti sehingga dapat mempercepat daya serap anggaran pada pelaksanaan Renstra selanjutnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**2.4.1 Kelompok Sasaran Layanan**

Untuk pelaporan SPM Bidang Perhubungan sesuai dengan arahan dari Kemendagri bahwa Bidang Perhubungan sudah tidak termasuk dalam urusan dasar hanya urusan wajib, dan dengan

terbitnya Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana terdapat pembagian kewenangan pusat dan daerah khusus untuk sektor Perhubungan lebih terfokus kepada Sektor Transportasi Darat, Laut dan SDP sedangkan untuk kewenangan Sektor Transportasi Udara seluruhnya menjadi kewenangan Pusat.

1. Transportasi Darat

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, yang meliputi kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Pagar Pengaman Jalan dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas LLAJ	Jumlah Terpasang					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	5	6	7	8	8	
1	Rambu Jalan	350 bh	356 bh	130 bh	1.333 bh	1.392 bh	105 bh
2	Marka Jalan	-	-	-	42.25	42.5	50.008
3	Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	1	1.2	-
4	CCTV/LPJU	-	38 unit	-	10	25	62
5	RPPJ	-	-	-	-	50	-
6	Paku Jalan	-	-	-	-	6.173	5.014
7	Alat Timbang Kendaraan Portable	-	-	-	-	3	-

Terhitung mulai Tahun 2013 s/d Tahun 2015 terdapat juga kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lalu Lintas Jalan, yang merupakan penerapan Penegakan Hukum dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penertiban lalu lintas angkutan kendaraan batubara dan kelapa sawit menyangkut jam operasi dan kapasitas muat.

Tahun 2016 s/d 2021 anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan khusus batubara dan kelapa sawit, tidak dialokasikan lagi mengingat volume lalulintas kendaraan angkutan batubara di ruas jalan provinsi maupun nasional sudah berkurang akan tetapi seiring dengan kembali meningkatnya angkutan batubara dan kelapa sawit maka pada tahun 2022 dan 2023 pengendalian angkutan khusus

batubara dan kelapa sawit kembali di tegakkan seiring dengan target nasional *Zero Over Dimension Over Loading (ODOL)* pada tahun 2023.

Data kendaraan yang terindikasi *Over Dimension Over Loading (ODOL)* pada tahun 2022 sebagai berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Kendaraan yang Diperiksa	Jumlah Kendaraan yang Melakukan Pelanggaran	Jumlah Kendaraan yang Tidak Melakukan Pelanggaran	Jumlah Tilang	Jumlah Kendaraan Melanggar ODOL	Ket.
1	3 s.d. 4 Februari 2022	Kawasan Industri Poros Kariangau Balikpapan	76	35	41	35	19	
2	29 s.d. 30 Mare 2022	Km. 13 Pintu Masuk Tol Balikpapan - Samarinda	91	61	30	39	26	
3	1 s.d. 2 September 2022	Simpang Muara Badak Kab. Kukar	220	46	174	46	39	
4	8 s.d. 9 September 2022	Kaliorang/Kaubun Kab. Kutai Tmur	81	35	56	34	28	
5	29 s.d. 30 September 2022	Simpang Janju Tanah Grogot Kab. Paser	160	49	111	39	18	
6	20 s.d. 21 September 2022	Samboja Muara Jawa Kab. Kukar	88	43	45	38	23	
7	27 s.d. 28 Oktober 2022	Talisayan Kab. Berau	89	33	56	25	22	
JUMLAH			809	302	513	256	175	

Pada Tahun 2022 kegiatan Penegakan Hukum terhadap kendaraan barang umum yang terindikasi *Over Dimension Over Loading* dilaksanakan di 9 Lokasi berbeda dengan rata - rata 115 kendaraan angkutan umum barang yang diperiksa di setiap lokasi dan jumlah kendaraan angkutan umum barang yang terbukti *Over Dimension Over Loading (ODOL)* adalah 175 Unit atau 25 % dari sampel yang diperiksa. Untuk jenis pelanggaran lainnya adalah kendaraan angkutan umum barang yang status KIR / Uji Kendaraan Bermotor yang mati atau tidak diperpanjang atau belum melakukan Uji Kendaraan Bermotor di PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) di Kab/Kota.

Adapun data kendaraan yang terindikasi *Over Dimension Over Loading (ODOL)* sementara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	LOKASI	NO. KENDARAAN	JENIS KENDARAAN	MERK KENDARAAN	KELEBIHAN MUATAN (KG)	JUMLAH KENDARAAN YANG DIPERIKSA	KETERANGAN
1	16 February 2023	BALIKAPAPAN LAMARU	KT 8872 YR	TRUCK		8,220	69 UNIT	OVERLOAD
			KT 8094 LU	TRUCK		13,780		OVERLOAD DAN KIR MATI
			KT 8875 AO	DT	MITSUBISHI	11,800		OVERLOAD DAN KIR MATI
			KT 8195 ZU			14,240		OVERLOAD
			KT 8640 LI	DT		9,220		OVERLOAD
			KT 8065 YR	DT		10,900		OVERLOAD
			KT 8552 YG	DT		9,500		OVERLOAD
			8823 GJ	PETI KEMAS		23,180		OVERLOAD
2	17 February 2023	BALIKAPAPAN LAMARU	KT 8965 KP	DT		37,800	60 UNIT	OVERLOAD
			KT 8954 UN	DT	TOYOTA	9,400		OVERLOAD
			KT 8893 KR	DT	TOYOTA	10,900		OVERLOAD
			KT 9960 KA	VOW	PT DBA	17,200		OVERLOAD
			KT 8480 LU	VOW		19,100		OVERLOAD
			KT 8472 LG	DYNA (DT)	TOYOTA	9,020		OVERLOAD
3	16 Februari s/d 17 Februari 2023	BALIKAPAPAN LAMARU	KT 8856 LG	DUMP TRUCK			33 UNIT	OVERLOAD
			KT 8401 YP	PICK UP				KIR MATI
			KT 8465 LF	PICK UP				OVERLOAD DAN KIR MATI
			KT 8823 KU					TIDAK DAPAT
			KT 8148 KZ	TRUCK BOX				KIR MATI
			KT 8425 LY					OVERLOAD
			KT 8939 LP	PICK UP				OVERLOAD DAN KIR MATI
			KT 8217 KP					KIR MATI
			KT 1533 AK	MINI BUS				KIR MATI
			KT 8980 CY	GRAND MAX				KIR MATI
			KT 8253 KB					KIR MATI
			KT 8286 LV					TIDAK DAPAT
			KT 8965 NI					TIDAK DAPAT
			KT 8663 CG	TRUCK				KIR MATI
			KT 8265 LH	PICK UP				KIR MATI
			W 9542 NY	PICK UP				KIR MATI DAN STNK TIDAK ADA
			KT 8650 YF					KIR MATI
			KT 8651 Y					KIR MATI / 2 TAHUN
			KT 8612 MD					KIR MATI
			KT 8695 LK					KIR MATI / 2 TAHUN
			KT 8797 YF					KIR MATI
			KT 8967 CF					KIR MATI
			KT 8912 EK					KIR MATI
			KT 8332 YF					KIR MATI
			KT 8179 YA					KIR MATI
			KT 1792 TG					KIR MATI
			KT 8369 UI					KIR MATI
			KT 8453 YN					KIR MATI
			KT 8524 AP					KIR MATI
			KT 8783 EG					TIDAK DAPAT
KT 8208 YB				TIDAK DAPAT				
KT 8285 LU				KIR MATI				
KT 8449 YN				TIDAK DAPAT				

4	14 April 2023	TANAH GROGOT JANJU	KT 8374 AB	PICK UP	MITSUBISHI	20,801	124 UNIT	OVERLOAD
			KT 8649 YT	FUSO	MITSUBISHI	12,300		OVERLOAD
			KT 8018 EF	FUSO	MITSUBISHI	9,380		OVERLOAD
			KT 8519 NL	FUSO	MITSUBISHI	10,640		OVERLOAD
			KT 8443 YJ	FUSO	MITSUBISHI	12,620		OVERLOAD
			KT 8519 NL	DT	FUSO	10,460		OVERLOAD
5	13 April 2023 s/d 14 April 2023	TANAH GROGOT JANJU	DA 8074 FF	TRUCK			41 UNIT	KIR MATI
			L 8201 NA	PICK UP				KIR MATI
			DA 8036 MG	LIGHT TRUCK				KIR MATI
			KT 8922 EN	PICK UP				KIR MATI
				MOPEN				KIR MATI
			KT 8455 YG	PICK UP				KIR MATI
			DA 8904 TZ	LIGHT TRUCK				KIR MATI
			KT 8037 AK	PICK UP				KIR MATI
			KT 8814 EM	PICK UP				KIR MATI
			KT 8484 BA	PICK UP				KIR MATI
				PICK UP				KIR MATI
			KT 8632 YK	DC				KIR MATI
			KT 8658 AK	TRUCK BOX				KIR MATI
			KT 8894 ED	MOBEN				KIR MATI
			KT 7197 VB	MOPEN				KIR MATI
			KT 8726 EO	PICK UP				KIR MATI
			DA 8107 ZL	DUMP TRUCK				KIR MATI
			H 9282 MG	PICK UP				KIR MATI
			KT 8049 EF	PICK UP				KIR MATI
			AD 8396 IG	PICK UP				KIR MATI
			DA 8750 BR	LIGHT TRUCK				KIR MATI
				BUS				KIR MATI
			KT 8177 EO	PICK UP				KIR MATI
			KT 8362 YY	PICK UP				KIR MATI
			KT 8378 EG	PICK UP				KIR MATI
			KT 8498 EN	PICK UP				KIR MATI
			KT 8621 ER	TRUCK				KIR MATI
			KT 8821 YT	DOUBLE CABIN				KIR MATI
			KT 8820 YQ	DOUBLE CABIN				KIR MATI
				TRUCK				KIR MATI
			KT 8649 YT	DUMP TRUCK				KIR MATI
			KT 8933 AP	TRUCK BOX				KIR MATI
			A 8193 FG	PICK UP				KIR MATI
			KT 8207 ED	PICK UP				KIR MATI
KT 8790 EF				KIR MATI				
BA 9215 E	PICK UP			KIR MATI				
KT 8934 EN	PICK UP			KIR MATI				
KT 8923 EN	DOUBLE CABIN			KIR MATI				
KT 8416 YO	TRUCK BOX			KIR MATI				
KT 8464 EE	PICK UP			KIR MATI				
KT 8672 LS	PICK UP			KIR MATI				

Pada Tahun 2023 kegiatan Penegakan Hukum terhadap kendaraan barang umum yang terindikasi *Over Dimension Over Loading* baru dilaksanakan di 2 Lokasi berbeda dengan jumlah kendaraan yang sudah diperiksa adalah 432 unit dan rata – rata 216 kendaraan angkutan umum barang yang diperiksa di setiap lokasi dengan hasil jumlah kendaraan angkutan umum barang yang terbukti *Over Dimension Over Loading (ODOL)* adalah 102 Unit atau 24 % dari sampel yang diperiksa. Untuk jenis pelanggaran lainnya adalah kendaraan angkutan umum barang yang status KIR / Uji Kendaraan Bermotor yang mati atau tidak diperpanjang atau belum melakukan Uji Kendaraan Bermotor di PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) di Kab/Kota. Program peningkatan pelayanan angkutan, meliputi kegiatan yang bersifat pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat operator dan pengguna jasa transportasi jalan, telah dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan yang berlokasi di Kab/Kota di Kalimantan Timur.

Bidang Perhubungan Darat, selain melaksanakan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD, juga terdapat kegiatan yang mengacu kepada tupoksi berupa penerbitan ijin dan sertifikat terkait pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu :

No.	Uraian Perijinan / Sertifikat	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Perpanjangan Ijin Operasional						
2	Perpanjangan Kartu Pengawasan	990 bh	788 bh	978 bh	83 bh	666 bh	76 bh
3	Ijin Insidentil	6 bh	9 bh	5 bh	2 bh	25 bh	0 bh
4	Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) Produksi Karoseri						

Terhitung mulai tahun 2015 penerbitan ijin dikelola oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dan untuk Sertifikat Registrasi Uji Type

(SRUT) Produksi Karoseri Dinas Perhubungan hanya mengeluarkan surat rekomendasi.

2. Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)

Terkait kegiatan rutin bidang yang bersifat pelayanan kepada masyarakat pemilik usaha angkutan SDP, maka Dinas Perhubungan melalui Bidang SDP pada tahun 2019 telah menerbitkan 36 rekomendasi perijinan yang meliputi :

No.	Uraian Perijinan / Sertifikat	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	8
1	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau (BBM) ke Hulu Sungai Mahakam						25 bh
2	Ijin Fasilitas Penyeberangan Angkutan Khusus BBM /BBG di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau						19 bh
3	Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau						
4	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal Sungai	62 bh	69 bh	64 bh	20 bh	456 bh	258 bh
5	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan						2 bh
6	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi	20 bh	20 bh	15 bh	16 bh	19 bh	13 bh
7	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal/Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi GT<7	57 bh	23 bh	11 bh		4 bh	
8	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal/Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi GT<7					14 bh	
9	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Sungai Danau Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi >7GT						217 bh
10	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speedboat Dalam Kota/Kab Dalam Provinsi >7GT						9 bh
11	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speedboat Dalam Kota/Kab Dalam Provinsi <7GT						1 bh
10	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 7 s/d 35	25 bh	22 bh	21 bh			
10	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 35 s/d 50	29 bh	11 bh	11 bh			
11	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 50 s/d 150	27 bh	36 bh	35 bh			
12	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 150 s/d 300	-	2 bh	2 bh			
Jumlah			220 bh	183 bh	36 bh	493 bh	544 bh

3. Transportasi Udara

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 kewenangan Bidang Transportasi Udara telah beralih ke Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Stake Holder terkait untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi Udara.

4. Keterkaitan Prasarana Transportasi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Perda No.1 Tahun 2023 :

Dukungan layanan transportasi pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut pertumbuhan ekonomi :

No	KSN/KSP	Prasarana	Keterangan
1	Kawasan Samarinda	Terminal Tipe B Sungai Kunjang, Lempake, Terminal Tipe A Samarinda Seberang, Bandara APT. Pranoto, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Palaran, Dermaga Sungai Kunjang, Dermaga Pasar Pagi/Samarinda Seberang	Dishub Prov. Kaltim, Dishub Kota Samarinda UPBU, Pelindo IV, KSOP, BPTD Wil. XVII
2	Kawasan Sanga-Sanga	Fasilitas Kelengkapan Jalan Provinsi	Dishub Prov. Kaltim
3	Kawasan Muara Jawa	Terminal Handil, Fasilitas Kelengkapan Jalan Provinsi	Dishub Prov. Kaltim
4	Kota Balikpapan	Terminal Tipe A Batu Ampar, Bandara SAMS Balikpapan, Penyeberangan Kariangau, TPK Kariangau	BPTD Wil. XVII, Angkasa Pura I, Pelindo IV
5	Kawasan Industri Bontang	Terminal Tipe B Bontang, Bandara Khusus Bontang	Dishub Prov. Kaltim, Badak NGL
6	Kawasan Industri Kab. Kukar	Terminal Tipe B Timbau Tenggarong	Dishub Prov. Kaltim
7	Kawasan Industri Maloy Kab. Kutim	Pelabuhan Maloy, Pelabuhan Sangkulirang	Maloy Batuta Trans Kalimantan
8	Kawasan Industri Buluminung Kota Balikpapan dan Kab. PPU	Penyeberangan Penajam	PT. ASDP, Dishub Kab. PPU

2.4.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan :

1. Kondisi geografis Kalimantan Timur yang berada diantara perairan ALKI II;
2. Keberagaman Sumber Daya Alam Kalimantan Timur yang beraneka ragam, yang memungkinkan lahirnya inovasi-inovasi di Bidang Perhubungan;
3. Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang proporsional karena masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kemampuan yang sangat signifikan untuk dikembangkan;
4. Penyebaran penduduk di Kalimantan Timur yang tidak merata, sehingga sangat memerlukan kesinambungan dan integrasi sektor transportasi kewilayahan;
5. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur;
6. Kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur;
7. Gaya hidup masyarakat Kalimantan Timur;
8. Kemajemukan tersedianya sarana dan prasarana di Kalimantan Timur;
9. Lemahnya pelaksanaan regulasi Bidang Perhubungan di Daerah;
10. Minimnya Regulasi/Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Bidang Perhubungan baik perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara;
11. Kurang optimalnya tingkat konsistensi penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
12. Reharmonisasi Regulasi antara Pusat dan Daerah;
13. Pengembangan Pelabuhan Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau) menjadi peluang Pendapatan;
14. Menjadikan Kaltim Berdaulat di Bidang Perhubungan;
15. Sinkronisasi Konektivitas ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Tantangan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Perda No.1 Tahun 2023 :

1. Konektivitas dan aksesibilitas terhadap Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Sarana dan prasarana sistem jaringan jalan (terminal penumpang/barang & jembatan timbang), sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut dan bandar udara umum dan bandar udara khusus;
3. Integrasi antar moda transportasi untuk mendukung konektivitas antar jaringan dan konektivitas ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

C. Peluang Pengembangan Pelayanan :

1. Keinginan dan cita cita Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk mengintegrasikan sarana dan prasarana transportasi antar wilayah;
2. Gaya hidup masyarakat Kalimantan Timur yang dominan konsumtif, sehingga memacu pelayanan transportasi yang harus merata dan mencukupi;
3. Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan yang berkeinginan untuk menambah kemampuan kompetensi keteknisan;
4. Sumber Daya Alam yang melimpah sangat memungkinkan untuk mendapat alokasi anggaran pembangunan Bidang Perhubungan secara proporsional
5. Peningkatan kebutuhan informasi dan teknologi, memacu untuk senantiasa berinovasi dalam upaya peningkatan pelayanan;
6. Kondisi semangat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kalimantan Timur;
7. Tingkat kepedulian masyarakat Kalimantan Timur yang tinggi, akan pentingnya pemenuhan fasilitas perhubungan baik moda darat, laut dan udara
8. Peningkatan pelayanan transportasi darat yang bersifat missal dan ramah lingkungan untuk angkutan barang dan orang;

9. Komitmen para pengambil keputusan terkait dengan SDGs dan Pengarustamaan Gender (PUG);
10. Adanya upaya harmonisasi regulasi oleh para pengambil kebijakan;
11. Adanya upaya penyelarasan program-program prioritas yang mendukung percepatan pembangunan Kawasan Khusus baik Kawasan Industri, Pusat Industri, Pusat Pemukiman dan Daerah Perbatasan, Pedalaman dan tertinggal;
12. Dukungan Project Prioritas Pembangunan Transportasi Ibu Kota Negara (IKN) di Kab. Penajam Paser Utara dari Pemerintah Pusat.

D. Peluang Pengembangan Pelayanan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Perda No.1 Tahun 2023 :

1. Arah perencanaan pembangunan yang telah selaras dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Telah adanya sarana dan prasarana transportasi yang menunjang aktivitas pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
3. Perencanaan dan pembangunan simpul – simpul transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) yang telah berjalan sesuai rencana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU TRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

1. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, lampu penerangan jalan, CCTV jalan;
- b. Masih adanya kecenderungan meningkatnya kecelakaan di jalan;
- c. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas;
- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang over dimensi dan over loading (ODOL) di jalan;
- e. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang LLAJ dan bersertifikat PPNS LLAJ;
- f. Belum tersedianya Rencana Induk Transportasi Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian program Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Provinsi (Analisa Dampak Lalu Lintas);
- h. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum;
- i. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum AKDP;
- j. Inflasi daerah yang diakibatkan terhambatnya arus angkutan orang dan barang

2. Bidang Pelayaran

- a. Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kelaikan berlayar untuk kapal – kapal angkutan SDP;
- b. Masih terdapat ketidaksamaan persepsi terkait regulasi penanganan kapal – kapal SDP;

- c. Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan berlayar di kapal – kapal yang berlayar di laut dan SDP;
- d. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap faktor keselamatan;
- e. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS SDP;
- f. Kurangnya sosialisasi / bimbingan keselamatan kepada para operator angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan laut dan SDP;
- g. Masih adanya fasilitas dermaga sungai dan penyeberangan yang kurang layak dan tidak memadai sehingga perlu peningkatan/perbaikan sesuai dengan perkembangan transportasi saat ini;
- h. Kurangnya konektivitas angkutan laut dan SDP ke tujuan wisata daerah;
- i. Belum optimalnya pelaksanaan SOP penanganan kapal – kapal Angkutan SDP di Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Masih adanya pelabuhan yang belum diserahkan pengelolaannya sesuai kewenangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- k. Rendahnya kesadaran Badan Usaha Kepelabuhanan, angkutan dan jasa terkait angkutan diperairan untuk melaporkan setiap kegiatan usahanya;
- l. Lemahnya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan Bidang Pelayaran di Kalimantan Timur.

3. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- a. Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi;
- b. Belum optimalnya sarana transportasi antar moda;
- c. Belum tersedianya dokumen rencana induk untuk terminal type B, dan Pelabuhan/Dermaga SDP;
- d. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Belum optimalnya ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup untuk Terminal Type B dan Pelabuhan/Dermaga SDP di Kaltim;

- f. Belum tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se-Kaltim;
- g. Belum optimalnya fasilitas Sistem Informasi dan Teknologi Perhubungan;
- h. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen sektor perhubungan di Kalimantan Timur.

4. UPTD Terminal Type B

- a. Belum tersedianya Rencana Induk Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Belum tersedianya perencanaan terminal terpadu di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Belum tersedianya kajian lingkungan (UKL/UPL) Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Kurangnya tenaga ASN yang memiliki kompetensi Teknis tentang pengelolaan terminal;
- f. Masih minimnya tenaga ASN di Terminal Tipe B yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS;
- g. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Angkutan antar Terminal Type B di Kalimantan Timur;
- h. Belum adanya Standar Pelayanan Operasional (SOP) di Terminal Type B;
- i. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan penyediaan fasilitas dan operasional di Terminal Type B;
- j. Belum adanya regulasi tentang legalitas aset Terminal Type B dari Pemerintah Kab/Kota ke Pememrintah Provinsi;
- k. Masih adanya lahan terminal yang dalam penguasaan masyarakat.

3.1.2 Identifikasi Potensi Kewilayahan

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai beberapa potensi untuk dikembangkan antara lain :

1. Wilayah Bagian Barat dari Provinsi Kalimantan Timur dapat dikembangkan sebagai sentra produksi perkebunan, kehutanan dan pertanian bagi komoditi ekspor karena memiliki pangsa

pasar yang luas dan nilai ekonomis tinggi. Komoditas tersebut meliputi hasil perkebunan tanaman keras, hasil hutan tanaman industri.

2. Wilayah Bagian Selatan dan Utara selain Kelapa Sawit dan Batu Bara, juga berpotensi dikembangkan wisata laut serta kawasan perikanan.
3. Sebagai kelengkapan dalam mendukung pengembangan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah bagian Utara Prov. Kaltim ini, perlu dikembangkan beberapa prasarana perhubungan sebagai berikut :
 - a. Pelabuhan Laut Internasional Maloy Teluk Golok yang berlokasi di Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur yang berfungsi sebagai outlet/inlet bagi komoditas Batu Bara (Miang Besar) ; komoditas CPO / kelapa sawit dan turunannya (Teluk Golok) ; Ekspor Import untuk Cargo (Teluk Golok) ; Penumpang (Maloy eksisting) ; komoditi perikanan (di Bual-Bual).
 - b. Pusat-pusat industri pengolahan hasil perkebunan terutama palm oil industry, yang dapat menampung hasil; perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sendiri maupun yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yaitu pembangunan pelabuhan di Karingau (TPK) dan Pelabuhan Buluminung Kab. Penajam Paser Utara.
 - c. Industri semen Kalimantan Timur, untuk memasok kebutuhan semen di Provinsi Kalimantan Timur serta Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara akan dibangun Pelabuhan Laut di Teluk Sulaiman Kab. Berau.
 - d. Pengembangan jaringan jalan baru yang dapat lebih luas mengakses ke sentra-sentra produksi hasil perkebunan kelapa sawit di wilayah timur dengan pusat industri pengolahannya yang lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Buluminung, yang dimaksudkan juga untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan bagi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

- e. Pengembangan Pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau lebih difokuskan pada kegiatan arus barang dan penumpang dari Pulau Jawa atau daerah lain serta untuk menampung arus kegiatan dari wilayah belakang Provinsi Kalimantan Utara.
- f. Pengembangan Bandara APT Pranoto Samarinda dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi pembukaan jalur penerbangan nusantara lainnya atau ditingkatkan menjadi Bandara Internasional. Selain itu juga dilakukan pengembangan jalur penerbangan reguler intra Kalimantan bagi 3 (tiga) Bandar Udara lainnya yaitu : Bandara Maratua di Kab. Berau (Destinasi Wisata Pulau Derawan dan sekitarnya) ; Bandara Melalan di Kab. Kutai Barat dan rencana pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Kab. Mahakam Ulu.
- g. Pengembangan intermoda transportasi regional Kalimantan antara moda angkutan sungai, laut, kereta api, jalan raya dan udara. Bagian terpenting dalam pengembangan prasarana transportasi adalah pengembangan sistem jaringan prasarana atau simpul strategis yang perlu dikembangkan dalam rangka mencapai struktur tata ruang yang meliputi sistem jaringan transportasi jalan, sungai, penyeberangan, laut, dan udara harus terintegrasi dalam satu simpul pengembangan transportasi yang direncanakan dapat menunjang pengembangan wilayah secara keseluruhan.

3.1.3 Identifikasi Tujuan Berdasarkan Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Pengembangan angkutan massal pada lintas Samarinda-Balikpapan ; Samarinda - Bontang - Sangatta - Berau (Kawasan SAMBOSABE)
- b. Meningkatkan kapasitas seat penumpang (dari MPU ke bus sedang/besar);
- c. Mengembangkan trayek angkutan bus Bandara APT. Pranoto Samarinda ke pusat-pusat bangkitan penumpang dan atau pusat-pusat industri;

- d. Mengembangkan pelayanan daerah terisolasi dengan angkutan perintis;
- e. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jalan Provinsi;
- f. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, pagar pengaman dan lain-lain) pada ruas jalan Provinsi;
- g. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar Kota dalam Provinsi (AKDP);
- h. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi teknis dan tenaga PPNS Jalan;
- i. Tersedia Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Menurunnya angka kecelakaan baik kategori ringan, sedang dan atau berat;
- k. Tersedianya dokumen rencana induk/master plan LLAJ Prov. Kaltim;
- l. Menurunnya tingkat pelanggaran (ODOL) angkutan barang di jalan;
- m. Terpenuhinya pelayanan angkutan umum AKDP guna mendukung mobilitas masyarakat di Kalimantan Timur
- n. Terpenuhinya SPM angkutan umum AKDP di Kaltim;
- o. Terwujudnya sistem manajemen keselamatan (SMK) operator angkutan umum AKPD di Kaltim;
- p. Menurunnya tingkat kecelakaan angkutan di Jalan Provinsi;
- q. Terbangunnya terminal Type B di masing-masing Kab/Kota di Kalimantan Timur;
- r. Tercapainya target Capaian Kinerja Kepuasan Masyarakat pengguna Terminal type B di Kalimantan Timur
- s. Mendukung IKN;

2. Bidang Pelayaran

- a. Peningkatan pelayanan trayek angkutan penumpang dan barang pada daerah yang masih terisolasi dan pelayanan trayek angkutan barang;
- b. Peningkatan kelancaran dan keselamatan lalu lintas pada alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;

- c. Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah Kaltim;
- d. Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari;
- e. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari;
- f. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- g. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi.
- h. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan;
- i. Tersedianya pelabuhan pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan;
- j. Terpenuhinya standar keselamatan kapal yang berlayar diperairan daratan dengan ukuran 7 GT s/d 150 GT yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- k. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran 7 GT s/d 150 GT;
- l. Terbangunnya dermaga sungai Aji Imbut Kab. Kutai Kertanegara;
- m. Terbangunnya dermaga sungai Muara Kaman Kab. Kutai Kertanegara;
- n. Terbangunnya Dermaga Sungai Tabang Kab. Kutai Kertanegara;
- o. Peningkatan Pelabuhan Sungai Melak Kab. Kutai Barat;

- p. Peningkatan Pelabuhan Sungai Tering Kab. Kutai Barat;
- q. Peningkatan Pelabuhan Sungai Ujoh Bilang Kab. Mahulu;
- r. Peningkatan Pelabuhan Sungai Long Pahangai Kab. Mahakam Hulu;
- s. Peningkatan Pelabuhan Sungai Senaken Tana Paser;
- t. Peningkatan Pelabuhan Sungai Meridan di PPU;
- u. Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Kab. Kutai Timur;
- v. Terlaksananya pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan oleh Pemerintah Daerah;
- w. Mendukung IKN.

3. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- a. Terbangunnya jaringan trase Kereta Api Umum dan Barang di Kalimantan Timur;
- b. Terbangun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- c. Tersedianya System Informasi Manajemen Keterpaduan Moda/antar moda di Kalimantan Timur;
- d. Terintegrasinya layanan terminal type di Kalimantan Timur secara on line;
- e. Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional;
- f. Beroperasinya secara optimal pelabuhan pengumpan regional di Kalimantan Timur;
- g. Tersedianya dokumen lingkungan di Pelabuhan Pengumpan Regional dan Terminal Type B se- Kalimantan Timur;
- h. Mendukung IKN.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Kategori	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	2	3	4	5	6
1.	Lalu Lintas Jalan	1. Ketersediaan perlengkapan keselamatan jalan yang belum optimal di jalan Provinsi (Pengadaan perlengkapan jalan yang kurang, dan yang habis umur teknis/rusak)	1. Kurangnya ketersediaan perlengkapan keselamatan jalan	1. Belum terpenuhinya kebutuhan pengadaan perlengkapan fasilitas keselamatan pada ruas jalan provinsi (meliputi rambu jalan, marka jalan, paku jalan, pagar pengaman jalan, cermin, deliniator, RPPJ, lampu penerangan jalan dan CCTV yang memenuhi persyaratan teknis)	Belum optimalnya kualitas pelayanan transportasi darat
	Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan	2. Tingginya pelanggaran operasional kendaraan angkutan barang (ODOL), penggunaan crossing jalan oleh perusahaan tambang/perkebunan sawit dan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi MRLL di jalan provinsi	1. Kurangnya kepatuhan pengguna jalan dan pelaku usaha terhadap manajemen rekayasa lalu lintas	1. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan MRLL dan andalalin di jalan Provinsi serta pengawasan Perda tentang jalan tambang dan sawit	
		1. Kecenderungan meningkatnya kecelakaan di jalan yang melibatkan angkutan umum (angkutan orang dan barang umum) di jalan Provinsi dan inflasi daerah yang tinggi	1. Kendaraan yang tidak berkeselamatan (ODOL) dari luar dan dalam daerah Kaltim	1. Belum optimalnya pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang over dimensi dan <i>over loading</i> (ODOL) di jalan	
			2. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum/barang AKDP	1. Banyaknya kendaraan barang dari luar Kaltim yang beroperasi di Kaltim dan kurang tertibnya dalam mengurus uji kendaraan bermotor secara berkala dan perizinannya	
			3. Kesadaran masyarakat terkait keselamatan ber-lalu lintas yang masih rendah	1. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan secara langsung kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa	
			4. Inflasi daerah yang mengakibatkan angkutan orang atau barang melakukan <i>over loading</i>	1. Tingginya biaya operasional angkutan orang atau barang sehingga diperlukan subsidi ongkos angkut	
		2. Jumlah pengguna angkutan umum yang semakin menurun	1. Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dan angkutan sewa khusus (online) sebagai moda transportasi utama	1. Fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum yang tidak menarik masyarakat (terminal, armada dan akses ke terminal) 2. Layanan angkutan umum yang tidak dapat diandalkan dalam ketepatan waktu 3. Angkutan sewa khusus (online) yang memberikan banyak kemudahan dan belum adanya skema Buy The Service untuk angkutan perkotaan	

2.	Pengembangan Transportasi dan Multimoda	1.	Belum optimalnya pelayanan dan pembangunan sektor perhubungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan pengguna transportasi	1.	Prasarana perhubungan masih ada yang belum memiliki dokumen lingkungan dan dokumen teknis sesuai peraturan	1.	Panjangnya tahapan untuk memenuhi semua dokumen lingkungan dan dokumen teknis lainnya	Belum optimalnya kualitas pelayanan antar moda dan terminal tipe B			
		2.	Belum terpenuhinya sistem transportasi massal antarmoda dan fasilitas penunjangnya	2.	Masih belum meratanya kualitas pelayanan dan pembangunan terminal tipe B dan infrastruktur penunjangnya	1.	Masih terbatasnya implementasi perencanaan dan sistem jaringan transportasi antar wilayah		2.	Masih belum optimalnya pengelolaan terminal tipe B, pelabuhan, dermaga, penyeberangan dan belum terintegrasinya dengan moda transportasi di wilayah Kabupaten/Kota serta Sistem Manajemen Informasi	
						3.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana simpul transportasi (terminal tipe B, pelabuhan, dermaga, penyeberangan)				
						1.	Pembangunan perkeretaapian umum di Kaltim masih dalam tahap penyusunan rencana induk				
						3.	Pelayanan transportasi udara di Kaltim yang belum optimal			1.	Belum terbangunnya bandar udara di daerah 3 T dan Kab. Paser
		2.	Belum optimalnya layanan angkutan udara dan keselamatan penerbangan	1.	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan kebandarudaraan						
		3.	Perhubungan Laut dan ASDP	1.	Belum optimalnya pengelolaan pelabuhan laut pengumpan regional dan SDP kewenangan Provinsi	1.	Kewenangan pengelolaan pelabuhan laut pengumpan regional dan lokal yang belum diserahkan		1.	Koordinasi yang belum optimal dengan pemerintah pusat	Belum optimalnya kualitas pelayanan pelabuhan/dermaga laut, sungai, danau dan penyeberangan
						2.	Kewenangan pengelolaan pelabuhan sungai dan danau yang belum diserahkan		1.	Koordinasi yang belum optimal dengan kab/kota	
						3.	Kurangnya konektivitas angkutan laut dan SDP ke tujuan wisata daerah		1.	Kurangnya pelabuhan/dermaga ke tujuan wisata daerah	
				2.	Perubahan regulasi perizinan kapal	1.	Kendala pemenuhan syarat-syarat perizinan kapal		1.	Pemahaman dan sosialisasi yang kurang terhadap proses dan sistem perizinan kapal	
2.	Dinamika penyesuaian tarif angkutan sungai dan penyeberangan										
3.	Belum adanya penetapan jaringan trayek angkutan SDP										
3.	Perubahan regulasi penyelenggaraan kegiatan usaha jasa terkait angkutan di perairan			1.	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan sertifikat standar kegiatan usaha jasa terkait angkutan di perairan	1.	Kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap proses perizinan				

4.	Sumber Daya Manusia	1.	Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	1.	Belum adanya peta kompetensi SDM	1.	Belum optimalnya pelatihan peningkatan kompetensi SDM PNS dan Non PNS	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja ASN
				2.	Belum adanya penambahan ASN	1.	Belum adanya proses perekrutan ASN baru	
				3.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pegawai	1.	Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja	

3.1.4 HASIL TELAAHAN TERHADAP RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan dapat diuraikan arah kebijakannya sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Arah Kebijakan Rencana Strategis 2020-2024
Kementerian Perhubungan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi simpul transportasi eksisting • Pembangunan simpul transportasi baru • Pembagian komoditi barang ekspor impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia • Reaktivasi jalur moda transportasi • Sinergitas angkutan umum dengan moda transportasi lokal • Penguatan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia • Penguatan jaringan layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Jaringan Transportasi Eksisting • Perluasan jaringan layanan transportasi • Penguatan transportasi antar moda dan multi moda • Pembangunan fasilitas alih moda dan multi moda • Penerapan Traffic Demand Management pada semua layanan transportasi • Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang di seluruh wilayah Indonesi • Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi • Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN dan PSN • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local

		<p>moda eksisting terhadap simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas melalui perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local • Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi • Penyiapan kompetensi keahlian professional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia • Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia • Mendorong pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan • Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda • Mendorong peluang kerja sama dengan Badan Usaha/swasta untuk melaksanakan proyek potensial?
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi • Optimalisasi SDM pelayanan sarana dan prasarana • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi • Penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi • Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi • Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan • Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan

		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan skema pendanaan pengembangan system transportasi perkotaan • Mendukung kinerja logistic nasional 	<p>kondisi real time OTP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan terhadap transportasi ramah lingkungan gender, difabel, dan lansia • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana • Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi • Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (Buy The Service) • Standarisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman, panjang dermaga, kinerja bongkar muat) • Pengembangan rute jaringan saling terhubung (loop) distribusi domestic • Pengembangan sistem informasi logistic (e-logistic) • Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan hinterland • Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri • Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat)
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan • Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkotaan, KIR <i>online, travel data recording</i> • Pengembangan aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum • Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan • Pembatasan usia saran prasarana transportasi • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan • Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi • Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi

		<p>pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan • Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum • Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi • Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian • Pengembangan system informasi terkait security awareness di setiap lokasi simpul utama transportasi • Pemenuhan SDM keselamatan dan keamanan transportasi darat, KA, Laut, Udara 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan • Edukasi keselamatan transportasi • Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi • Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api • Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi • Peningkatan pelaksanaan rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi • Jangka waktu proses pengusulan kebijakan hingga menjadi keputusan atau peraturan menteri perhubungan

		kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan dalam keputusan atau peraturan menteri perhubungan • Peningkatan EST (Environmentally Sustainable Transportation) / transportasi berkelanjutan untuk setiap kota metropolitan dan kota besar
			<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan Penyusunan SOP layanan transportasi ramah lingkungan
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri dan pengembangan sarana prasarana transportasi • Pembentukan SDM yang berkarakter dan berintegrasi • Peningkatan relevansi dan daya saing lembaga diklat SDM transportasi • Optimalisasi peran kelembagaan (BPSDM Perhubungan) dalam pengembangan SDM transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni • Peningkatan <i>Link and Match</i> SDM Transportasi • Penguatan SDM Transportasi Berbasis Wilayah dan Kemasyarakatan • Peningkatan Pendidikan Agama, Karakter dan Budi Pekerti • Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai agama • Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara • Melakukan reformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi disektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi • Peningkatan kualitas dan pengembangan penelitian (<i>Research & Development</i>) • Transformasi kelembagaan Balai/UPT BPSDM Perhubungan menuju BLU/BHMN • Peningkatan peran BPSDM Perhubungan dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan

			SDM transportasi
6.	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung Nilai Indeks berkelanjutan (<i>sustainability index</i>) pada sarana dan/atau prasarana transportasi sebagai acuan dan <i>feedback</i> bagi peningkatan kualitas sistem transportasi • Perumusan kebijakan adaptasi dan/atau miigasi perubahan iklim di sektor transportasi serta pelaporan rencana aksi penurunan emisi GRK di sektor tranportasi Melakukan Pemetaan Dan Intensifikasi Dokumen Lingkungan
7.	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reuiu Renstra dan Renja Kemenhub secara kontinu • Melakukan Evaluasi Kemanfaatan Terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi • Pengembangan dan penyempurnaan untuk monitor capaian kinerja seluruh pegawai Dinas Perhubungan • Pengembangan sistem e-monev untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan • Mendorong peningkatan tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA)

8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi reformasi regulasi dalam pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di Dinas Perhubungan • Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penegakan hukum secara konsisten • Penyempurnan SOP layanan transportasi • Pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Dinas Perhubungan • Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan peran Balai atau UPT • Deregulasi peraturan dan perijinan serta sinkronis regulasi antar lembaga • Penilaian atas capaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban paket-paket deregulasi perijinan di lingkungan Dinas Perhubungan • Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna dalam penerapan SOP layanan transportasi • Penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan transportasi baik komersil maupun non komersil • Pelaksanaan edukasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi • Peningkatan pengelolaan / manajemen transportasi untuk mendukung <i>smart city</i> pada kota besar dan metropolitan Peraturan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Dinas Perhubungan
----	---	--	---

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan.

Tabel. 3.3.
Permasalahan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan
Peserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Belum adanya pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia	Belum adanya pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia	Perlu dilakukan pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi dan belum maksimalnya layanan angkutan massal diperkotaan	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi dan belum maksimalnya layanan angkutan massal diperkotaan	Terus meningkatkan kinerja pelayanan transportasi dan memaksimalkan layanan angkutan massal diperkotaan
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Kurang memadainya penanganan gangguan	Kurang memadainya penanganan gangguan	Terus meningkatkan penanganan gangguan

		keselamatan transportasi dan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan	keselamatan transportasi dan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan	keselamatan transportasi dengan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Perlu dilakukan kajian secara terperinci untuk menetapkan regulasi dalam implementasi kebijakan perhubungan di daerah
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	Perlunya peningkatan kualitas SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan dengan adanya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas	Kurangnya SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan dengan adanya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas	Terus dikembangkan SDM bidang perhubungan dengan melakukan penelitian di bidang perhubungan yang berkualitas

6.	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda serta belum optimalnya penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah	Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda serta belum optimalnya penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah	Terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda serta adanya pengoptimalan penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah
7.	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	Perlunya meningkatkan pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan terhadap kinerja dinas perhubungan	Kurang maksimalnya pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan terhadap kinerjadinas perhubungan	Terus ditingkatkannya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan untuk mewujudkan <i>Clean Governance</i>
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik	Perlunya mewujudkan <i>good governance</i> dalam bidang pelayanan	Kurangnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan dan	Terus ditingkatnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan

		perhubungan dan kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	untuk mewujudkan <i>good governance</i> dan melakukan pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi
--	--	--	--	--

3.1.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036 telah dilaksanakan peninjauan kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembangunan terminal penumpang Tipe B di Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahulu	Belum terbangunnya terminal Tipe B di Kab. Mahakam Ulu	Belum terbangunnya terminal Tipe B di Kab. Mahakam Ulu	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2.	Pembangunan terminal penumpang Tipe Kab. Kutai Barat	Belum terbangunnya terminal penumpang Tipe B di Kab. Kutai Barat	Belum terbangunnya terminal penumpang Tipe B di Kab. Kutai Barat	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan

				peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3.	Pembangunan terminal penumpang Terpadu di Ibukota Provinsi	Belum terbangunnya terminal penumpang terpadu di Ibukota Provinsi Kaltim	Belum terbangunnya terminal penumpang Terpadu di Kota Samarinda	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
4.	Pengembangan dan peningkatan Terminal Type B Sei Kunjang, Lempake, Sangatta, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Belum optimalnya fasilitas Terminal Type B Sei Kunjang, Lempake, Sangatta,, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Belum optimalnya fasilitas Terminal Type B Sei Kunjang, Lempake, Sangatta,, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan antar dan atau dalam provinsi	Belum optimalnya fasilitas pelabuhan penyeberangan di Prov. Kaltim	Belum optimalnya fasilitas pelabuhan penyeberangan di Provi.Kaltim	Terus ditingkatkannya fasilitas pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur
6.	Pengembangan jaringan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota antar dan atau dalam Provinsi	Belum optimalnya jaringan angkutan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Belum optimalnya jaringan angkutan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Terus dikembangkannya jaringan angkutan penyeberangan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat
7.	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Kaltim	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Terus ditingkatkannya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur
8.	Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana Pelabuhan Maloy	Kurang memadainya prasarana di pelabuhan Maloy	Kurang memadainya prasarana di pelabuhan Maloy	Terus ditingkatkannya prasarana pelabuhan di Maloy

9.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Balikpapan	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan
10.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Tanjung Laut dan Lok Tuan Kota Bontang	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Lok Tuan Kota Bontang	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Lok Tuan Kota Bontang	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Lok Tuan Kota Bontang
11.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	Belum optimalnya pemb. dan pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur
12.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Tanjung Redeb, Mantaritip dan rencana Teluk Sulaiman di Kab. Berau	Belum optimalnya pemb. dan pengembangan pelabuhan Tanjung Redeb, Mantaritip dan Teluk Sulaiman di Kab. Berau	Belum optimalnya pemb. dan pengembangan pelabuhan Tanjung Redeb, Mantaritip dan Teluk Sulaiman di Kab. Berau	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kabupaten Berau
13.	Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau di Alur Pelayaran Sungai Mahakam	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sungai di Alur Pelayaran Sungai Mahakam	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sungai di Alur Pelayaran Sungai Mahakam Prov. Kaltim	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sungai dan Danau pada Alur Pelayaran Sungai Mahakam
14.	Pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahakam Hulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu

15.	Pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoh Bilang Kab. Mahakam Hulu	Belum Optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoh Bilang Kab. Mahulu	Belum Optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoh Bilang Kab. Mahulu	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoh Bilang Kab. Mahulu
16.	Pembangunan dan pengembangan Bandara Datah Dawai Kab. Mahakam Hulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Datah Dawai Kab. Mahulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Datah Dawai Kab. Mahulu	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan Bandara Datah Dawai Kab. Mahulu
17.	Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian berupa pembangunan jalan kereta api dan rencana pembangunan stasiun kereta api	Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Timur	Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Timur	Terus dikembangkannya pembangunan sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Timur
18.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kawasan Perkotaan Kota Balikpapan	Belum tersediannya Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan	Belum tersediannya Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan	Terus ditingkatkannya pembangunan Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan
19.	Pengembangan sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder)	Belum tersediannya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota Balikpapan	Belum tersediannya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota Balikpapan	Terus dikembangkannya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota Balikpapan

3.1.6 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Merujuk pada Perda No. 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Kaltim dan Dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan kedalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan 2024-2026

terhadap rencana dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup mendasari adanya keinginan dan semangat untuk melakukan perubahan dalam penyusunan cita-cita lima tahun kedepan dalam RENSTRA 2024-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya SKPD Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebagai salah satu upaya untuk mendorong terjadinya peningkatan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, dengan adanya percepatan pelaksanaan proses reformasi birokrasi diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah *good governance*.
2. Mendasari terjadinya dinamika perekonomian Regional, domestik maupun global yang mengharuskan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa diharuskan siap menghadapi perubahan serta memperhatikan keberadaan Kalimantan Timur yang berada di wilayah AKLI II yang sangat berpotensi untuk menjadi beranda depan dalam pembangunan Indonesia Wilayah Tengah. Dimana hal ini mengharuskan Kalimantan Timur mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya Provinsi yang maju, untuk itu dipandang perlu untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi, oleh karena itu melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 telah diterbitkan MP3EI Tahun 2011-2025, yang akan memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025, khususnya Regional Kalimantan Timur.
3. Adanya beberapa kejadian bencana alam (banjir, jalan putus dan longsor) yang masih melanda wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan isu strategis yang perlu dimunculkan mengingat berbagai bencana tersebut cukup berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan prasarana transportasi, terutama yang berada di kawasan rawan bencana.
4. Adanya kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional melalui Inpres No.9 Tahun 2000 mengamanahkan seluruh Kementerian dan Lembaga

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat menyusun kebijakan, program dan kegiatan masing-masing.

Dalam rangka mengintegrasikan rencana dan program sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan, dengan prediksi program yang terindikasi berpotensi berdampak pada Isu Strategis KLHS Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP;
2. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan;
3. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara.

Dari 3 (tiga) Program tersebut yang paling berpotensi terindikasi berdampak pada Isu Strategis KLHS adalah Program pembukaan dan peningkatan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara.

1. Mitigasi dampak program terhadap aspek pencemaran dan kerusakan lingkungan

Program	Dampak program terhadap aspek pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mitigasi Dampak
Pembukaan dan peningkatan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara	Transportasi Darat : a. Mempengaruhi terjadinya konversi lahan produktif yang ada di sisi kanan kiri jalan b. Meningkatkan pencemaran lingkungan (sampah, udara) disekitar terminal yang berakibat pada meningkatnya vector penyakit	a. Kajian lingkungan untuk pembangunan terminal beserta fasilitas penunjang b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin lingkungan
	Transportasi Laut, Sungai & Danau : a. Mengganggu ekosistem pantai, laut, sungai dan danau b. Meningkatkan abrasi disisi kanan kiri pelabuhan c. Meningkatkan pencemaran	a. Kajian lingkungan untuk pembangunan pelabuhan, terminal khusus dan TUKS b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin lingkungan c. Mempertimbangka

	<p>lingkungan</p> <p>d. Dapat memicu meningkatnya pemukiman yang tidak teratur disekitar, pelabuhan terminal yang berakibat pada menurunnya derajat kesehatan masyarakat</p> <p>e. Mengurangi luas wilayah tangkapan nelayan tradisional</p>	<p>n pengendalian ekosistem pantai, laut, sungai dan danau</p>
	<p>Transportasi Udara :</p> <p>a. Memicu alih fungsi lahan disekitar bandara</p> <p>b. Meningkatkan kebisingan</p> <p>c. Daerah resapan air berkurang sehingga run off meningkat</p> <p>d. Pembatasan kawasan terbangun di sekitar bandara</p>	<p>a. Kajian lingkungan untuk pembangunan bandara beserta fasilitas penunjangnya</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin lingkungan</p> <p>c. Pembuatan zoning regulation untuk kawasan permukiman di sekitar bandara</p>

2. Mitigasi dampak program terhadap aspek pelayanan infrastruktur dan daya saing

Program	Dampak program terhadap aspek pelayanan infrastruktur dan daya saing	Mitigasi Dampak
Pembukaan dan peningkatan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara	Dapat memicu meningkatnya permukiman baru yang tidak teratur disekitar terminal, pelabuhan terminal khusus, dan Bandara	Pembuatan zoning regulation untuk kawasan permukiman disekitar terminal, pelabuhan dan terminal khusus dan Bandara

3. Mitigasi dampak program terhadap aspek social ekonomi dan kesehatan masyarakat

Program	Dampak program terhadap aspek social ekonomi dan kesehatan masyarakat	Mitigasi Dampak
---------	---	-----------------

Pembukaan dan peningkatan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara	Meningkatnya kerentanan sosial	a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat b. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
---	--------------------------------	--

Berdasarkan identifikasi perkiraan dampak negative yang ditimbulkan oleh program prioritas diatas, terkait dengan upaya meminimalisir dampak negative terhadap Isu KLHS Prov. Kalimantan Timur, upaya dan rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya mitigasi secara terencana dan terkendali, melalui pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan;
2. Melakukan kajian lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang, baik tata ruang pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan :
 - a. Peraturan dan mekanisme izin pinjam pakai, jika rencana kegiatan (Non kehutanan) berada pada kawasan budidaya kehutanan (KBK);
 - b. Tidak termasuk dalam area yang dilarang sesuai SK Menteri Kehutanan No. 608.
3. Dalam skala proyek, pembangunan fisik dari program-program tersebut harus mempunyai kajian lingkungan
4. Terkait dengan pelayanan infrastruktur dan daya saing, maka harus memperhatikan :
 - a. Peraturan Daerah No : 10 Tahun 2012
 - b. Pengetatan perizinan pembangunan pelabuhan. Terminal, Bandara beserta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan;
 - b. Pengkajian lokasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi dan program Kepala Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas

Perhubungan dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

- a. Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi darat, pemerintah daerah terus berupaya secara bertahap menerapkan prinsip – prinsip 5 (lima) Pilar Aksi Keselamatan Jalan dalam rangka mendukung Rencana Umum Nasional Keselamatan;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan meningkatkan fasilitas keselamatan jalan, meningkatkan standard keselamatan kendaraan angkutan umum dan melakukan pembinaan terhadap badan usaha jasa transportasi;
- c. Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi darat, pemerintah daerah terus berupaya secara bertahap menerapkan prinsip – prinsip 5 (lima) Pilar Aksi Keselamatan Jalan dalam rangka mendukung Rencana Umum Nasional Keselamatan;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan meningkatkan fasilitas keselamatan jalan, meningkatkan standard keselamatan kendaraan angkutan umum dan melakukan pembinaan terhadap badan usaha jasa transportasi.

2. Peningkatan kualitas pelayanan Bidang Pelayaran (pelabuhan/dermaga laut, sungai, danau dan penyeberangan).

- a. Pemerintah daerah secara bertahap akan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur khususnya pelabuhan/dermaga;
- b. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya penguatan sektor ekonomi daerah dan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi khususnya untuk aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan secara komprehensif dari sisi pemenuhan infrastruktur, keselamatan dan pembinaan badan usaha.

3. Peningkatan pelayanan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian.

- a. Peningkatan kemudahan dan kenyamanan pelayanan antarmoda merupakan tuntunan dari semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang efektif dan efisien;

- b. Peningkatan pelayanan antarmoda di Kalimantan Timur guna mewujudkan antarmoda yang terintegrasi dengan pemadu moda dimulai dengan perencananya yang matang sehingga dapat diperoleh informasi simpul – simpul transportasi yang terintegrasi dan memadai.

4. Peningkatan pelayanan terminal.

- a. Pengelolaan Terminal Tipe oleh Pemerintah Provinsi merupakan amanat UU 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Pelayanan terminal menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam tugas dan fungsinya sehingga peningkatan pelayanan terminal wajib dilakukan dengan strategi peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B.

5. Peningkatan kinerja pelayanan ASN perhubungan dan akuntabilitas kinerja.

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sektor perhubungan dan pembenahan peraturan/kebijakan/ regulasi di sektor perhubungan adalah faktor penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan sektor perhubungan;
- b. Peningkatan kualifikasi teknis dan kompetensi SDM perhubungan;
- c. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada empat komponennya yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Akuntabilitas Kinerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kaltim didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dimana Dinas Perhubungan Prov. Kaltim mendukung Aspek Ekonomi Wilayah pada Tujuan 2 yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” yang didukung oleh Sasaran 7 yaitu “Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar” dengan pengertian adalah pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi (termasuk infrastruktur dasar) meliputi *public utilities*, telekomunikasi, sanitasi (air minum, air limbah domestik dan persampahan), pekerjaan umum (jalan, bendungan, irigasi, drainase, dan sektor transportasi, jalan raya, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang/bandar udara) dan ketenagalistrikan dan Tujuan 4 yaitu “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung dengan ASN BerAKHLAK” yang didukung Sasaran 11 yaitu “Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Dengan ASN yang Profesional” dengan pengertian pengembangan profesionalisme aparatur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan publik berbasis elektronik dan Sasaran 12 yaitu “Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel” dengan pengertian meningkatkan birokrasi yang transparan dan berintegritas.

4.1.1. Tujuan

Tujuan 1 :

Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar di Kalimantan Timur.

Metadata Tujuan 1:

- Kualitas Infrastruktur adalah Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi (Keselamatan dan Kelancaran Jalan Provinsi, Konektivitas Angkutan AKDP dan Perizinan Angkutan & Trayek) serta Konektivitas Angkutan Laut & SDP dan Perizinan Angkutan & Trayek);

- Ketersediaan Infrastruktur adalah Pembangunan Fisik sektor transportasi (Fasilitas Keselamatan Jalan, Terminal Tipe B, Pelabuhan/Dermaga, Kereta Api dan Bandar Udara) yang menunjang aktivitas ekonomi.

Indikator :

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan.

Metadata Indikator :

Indeks Kualitas Infratraktur (IKLI) Perhubungan adalah Pembobotan dari Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan; Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP; dan Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian.

Tujuan 2 :

Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

Metadata Tujuan 2:

- Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel adalah birokrasi yang transparan dan berintegritas;
- Pelayanan Publik yang Berkualitas adalah pengembangan profesionalisme aparatur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan publik berbasis elektronik.

Indikator :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah.

Metadata Indikator :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah penyelenggaran pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

4.1.2. Sasaran

Sasaran Tujuan 1 :

Untuk memastikan pencapaian tujuan 1 yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah pembangunan perhubungan di Kalimantan Timur sebagai berikut :

“Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat - pusat perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur”.

Metadata Sasaran:

- Konektivitas adalah tingkat keterhubungan wilayah dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi; Aksesibilitas adalah kenyamanan atau kemudahan untuk mencapai suatu lokasi melalui sistem jaringan transportasi; Berkualitas adalah tersedianya infrastruktur, lancarnya pergerakan angkutan umum serta kemudahan perizinan; dan berkeselamatan adalah kelaikan sarana dan prasarana perhubungan

Indikator :

Rasio Konektivitas Provinsi.

Metadata Indikator :

Pembobotan dari rasio konektivitas darat, laut & SDP, udara dan kawasan perkotaan di Kaltim

Sasaran Tujuan 2 :

Untuk memastikan pencapaian tujuan 2 yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah pembangunan perhubungan di Kalimantan Timur sebagai berikut :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah”.

Metadata Sasaran:

- Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik;
- Layanan Publik Perangkat Daerah adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi atau perangkat daerah lain yang mempunyai

kepentingan pada perangkat daerah itu, sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Indikator :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah.

Metadata Indikator :

- a. Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan oleh dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah nilai rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan di Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal.

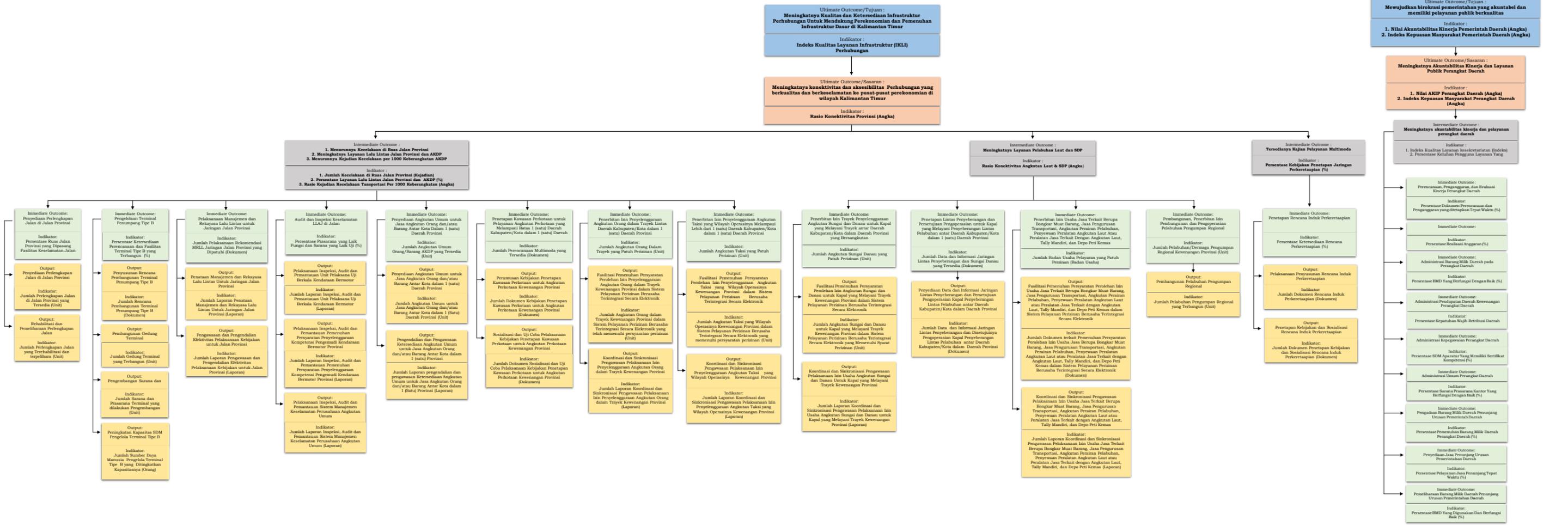
Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah dinas perhubungan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 (TC.25)
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun Dasar (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Tahun 1 (2024)	Tahun 2 (2025)	Tahun 3 (2026)
1. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar di Kalimantan Timur		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks)	72	80	85	90
	1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat - pusat perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur	Rasio Konektivitas Provinsi (Angka)	0,816	0,846	0,864	0,882

2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Angka)	78,10	78,50	79,30	80,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	84,41	85,00	85,50	86,00
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	73	76	77	78
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	81	83	85	87

Tabel 4.2 Pohon Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Ultimate Outcome/Tujuan :
Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki

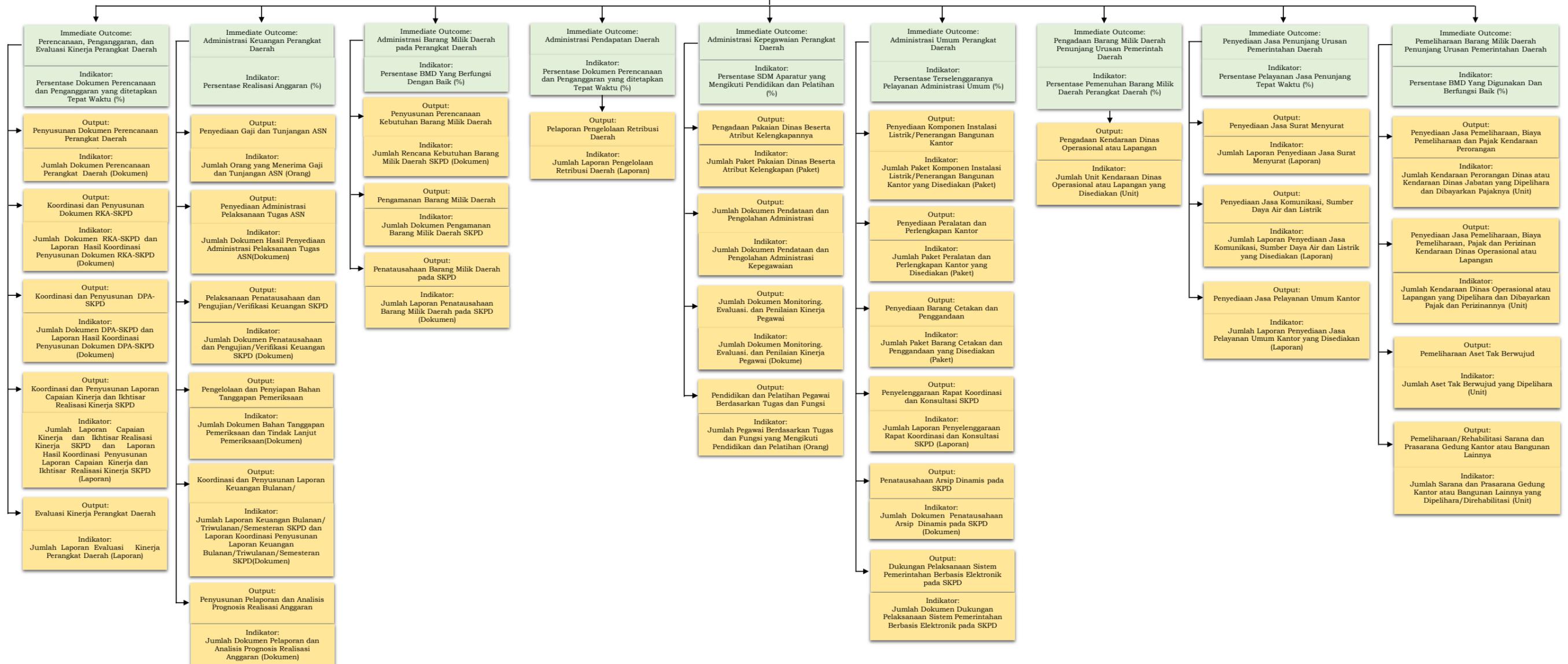
Indikator :
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Angka)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Angka)

Ultimate Outcome/Sasaran :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Indikator :
1. Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)

Intermediate Outcome :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

Indikator :
 1. Indeks Kualitas Layanan kesekretariatan (Indeks)
 2. Persentase Kehadiran Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan :

1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas kelengkapan transportasi darat;
2. Mendukung pengendalian inflasi daerah dari sektor transportasi;
3. Menyediakan dokumen lingkungan perhubungan;
4. Peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B;
5. Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan serta konektivitas ke tujuan wisata daerah;
6. Menyediakan rencana pengembangan titik-titik simpul layanan transportasi untuk mendukung IKN;
7. Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja;
8. Peningkatan profesionalisme/kapasitas dan integritas aparatur pemerintah serta sinergitas pemenuhan kebutuhan SDM.

5.1.2. Kebijakan Perangkat Daerah :

1. Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan;
2. Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan jalan dan kelancaran distribusi angkutan orang dan barang dengan subsidi ongkos angkut;
4. Mengembangkan perumusan kebijakan lingkungan perhubungan;
5. Membangun/Mengembangkan terminal tipe B;
6. Meningkatkan koordinasi untuk P3D dan meningkatkan sarana prasarana pelabuhan laut/dermaga dan SDP;
7. Meningkatkan kualitas layanan angkutan laut dan SDP serta konektivitas ke tujuan wisata daerah;
8. Mengembangkan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana pepadu moda serta mendukung konektivitas transportasi ke IKN dan tujuan wisata daerah;

9. Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah;
10. Meningkatkan kompetensi SDM, pemenuhan SDM serta mutu pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur;
11. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KINERJA	PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan fasilitas kelengkapan transportasi darat	1 Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan	Menurunnya Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Mendukung pengendalian inflasi daerah dari sektor transportasi	2 Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu sarana angkutan jalan		
Menyediakan dokumen lingkungan perhubungan	3 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan jalan dan kelancaran distribusi angkutan orang dan barang dengan subsidi ongkos angkut;		
Peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B	4 Mengembangkan perumusan kebijakan lingkungan perhubungan	Menurunnya Kejadian Kecelakaan per 1000 Keberangkatan AKDP	
Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi laut, sungai, danau & penyeberangan serta konektivitas ke tujuan wisata daerah	5 Membangun/ Mengembangkan terminal tipe B		
Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi laut, sungai, danau & penyeberangan serta konektivitas ke tujuan wisata daerah	1 Meningkatkan koordinasi untuk P3D dan meningkatkan sarana prasarana pelabuhan laut/dermaga dan SDP	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Laut dan SDP	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	2 Meningkatkan kualitas layanan angkutan laut dan SDP serta konektivitas ke tujuan wisata daerah		

Menyediakan rencana pengembangan titik-titik simpul layanan transportasi untuk mendukung IKN	1 Mengembangkan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana pemuatan moda serta mendukung konektivitas transportasi ke IKN	Tersedianya Penetapan Kebijakan Jaringan Perkeretaapian	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	1 Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peningkatan profesionalisme/kapasitas dan integritas aparatur pemerintah serta sinergitas pemenuhan kebutuhan SDM	2 Meningkatkan kompetensi SDM, pemenuhan SDM serta mutu pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur		
	3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2024 – 2026, rencana Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebanyak 4 (empat) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan yaitu :

Dinas Perhubungan :

Program Manajerial :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan RENSTRA
 - Penyusunan Dokumen Tatanan Transportasi Wilayah Kalimantan Timur
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Prioritas :

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu, Marka, Paku Jalan, Pagar Pengaman Jalan, Zona Selamat Sekolah, Operasional CCTV di Jalan Provinsi.

2.2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

1) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B

- Penyusunan DED, UKL-UPL Terminal Tipe B Kutai Barat dan Terminal Tipe B Penajam Paser Utara

2.3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

- Rekomendasi teknis MRL, Andalalin dan Study Lalu Lintas Harian ruas jalan provinsi

2) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

- Pelaksanaan penegakan hukum kendaraan angkutan barang umum yang terindikasi *Over Dimensi dan Over Loading*

2.4 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi

- Pembinaan pengemudi kendaraan bermotor
- Pemilihan pelajar pelopor
- Sosialisasi berkendara yang berkeselamatan ke sekolah menengah atas

2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

- Audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan

- Forum keselamatan angkutan jalan
 - Inspeksi keselamatan (ramp check)
 - Studi Rencana Aksi Keselamatan (RAK)
 - Pengawasan dan koordinasi terminal tipe B
- 3) Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Pengawasan dan koordinasi Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
- 2.5 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
- Monitoring dan evaluasi angkutan barang dan tarif angkutan
- 2) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Studi subsidi angkutan perintis
 - Pelaksanaan subsidi ongkos angkut
- 2.6 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 1) Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
- Studi pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema Buy The Services di Kota Samarinda dan Balikpapan dan pelaksanaannya
- 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
- Sosialisasi Studi pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema Buy The Services di Kota Samarinda dan Balikpapan dan pelaksanaannya

2.7 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Penerbitan pertimbangan teknis dan kartu pengawasan angkutan orang dalam trayek
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
 - Pemilihan abdi yasa teladan
 - Penilaian penghargaan Wahana Tata Nugaraha (WTN)
 - Penghargaan panji-panji keberhasilan pembangunan bidang perhubungan

2.8 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi
 - Pengawasan dan pengendalian angkutan orang tidak dalam trayek
- 2) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Penerbitan pertimbangan teknis angkutan orang tidak dalam trayek

III. Program Pengelolaan Pelayaran

3.1 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan

- 1) Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek

Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Penerbitan pertimbangan teknis dan kartu pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan
- Inspeksi keselamatan (ramp check) angkutan sungai danau dan penyeberangan
- Pengadaan life jacket, APAR dan Life Buoy

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi

- Forum Keselamatan Pelayaran

3.2 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

1) Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

- Studi jaringan trayek angkutan sungai danau Kalimantan Timur
- Studi Tarif angkutan sungai danau Kalimantan Timur
- Studi jaringan trayek angkutan penyeberangan Kalimantan Timur
- Monitoring tarif ASDP

3.3 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas

1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Penerbitan pertimbangan teknis dan sertifikat standar badan usaha jasa terkait angkutan di perairan

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

- Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan usaha jasa terkait angkutan di perairan

3.4 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional

- Studi subsidi ongkos angkut di perairan Kalimantan Timur
- Studi FS dan SID dermaga di casacade 3 danau
- Studi DED rehabilitasi dermaga melak
- Studi potensi pengelolaan pelabuhan Mantaritip
- Studi DED rehabilitasi dermaga Sungai Kunjang
- Studi kelayakan dermaga kapal klotok (Balikpapan Baru dan Penajam Paser Utara)
- Studi DED rehabilitasi dermaga Ujoh Bilang Mahakam Ulu dan Long Bagun

IV. Program Pengelolaan Perkeretaapian

4.1 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

- Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Prov. Kaltim
- Studi kelayakan penyelenggaraan perkeretaapian
- Studi FS trase 1 perkeretaapian
- Studi trase perkeretaapian

2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian

- Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Prov. Kaltim dan kelayakan penyelenggaraan perkeretaapian

UPTD Terminal :

Program Manjerial :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Prioritas :

II. Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B

2.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

- 1) Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
 - Review design terminal Sungai Kunjang
 - Pembangunan terminal Sangatta
 - Pembangunan terminal Sungai Kunjang
 - Revitalisasi terminal Timbau Tenggarong
- 2) Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B
 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terminal
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B
 - Pemenuhan SDM operator terminal

- 4) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
 - Pembangunan terminal Paser

Pada bagian ini ditampilkan secara rinci rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, seperti tabel berikut :

Tabel. 6.1 (TC.27)
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

**TABEL 6.1 (T-C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Misi/Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
Misi 3 : Berdaya dalam memenuhi infrastruktur kewilayahan						50.061.000.000		99.704.000.000		47.309.000.000		197.074.000.000							
Tujuan 1 : Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Di Kalimantan Timur	Sasaran 1 : Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks)	75	84	21.871.000.000	87	71.514.000.000	91	18.619.000.000	91	112.004.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				
				Rasio Konektivitas Provinsi (Angka)	0,816	0,846	21.871.000.000	0,864	71.514.000.000	0,882	18.619.000.000	0,882	112.004.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				
				Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	195	175	6.000.000.000	165	6.000.000.000	155	6.000.000.000	155	18.000.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				
				Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP (%)	74	82	7.704.000.000	86	56.859.000.000	90	3.964.000.000	90	68.527.000.000						
				Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan (Angka)	0,008	0,006	3.892.000.000	0,005	3.892.000.000	0,004	3.892.000.000	0,004	11.676.000.000						
				2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan (%)	75	80	4.200.000.000	82	4.200.000.000	85	4.200.000.000	85	4.200.000.000	85	12.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	5181	2243	4.200.000.000	2243	4.200.000.000	2243	4.200.000.000	6729	12.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
				2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (%)	44	53	850.000.000	58	850.000.000	60	850.000.000	60	850.000.000	60	2.550.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	5	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	3	2.550.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
				2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (%)	44	53	7.704.000.000	58	56.859.000.000	60	3.964.000.000	60	3.964.000.000	60	68.527.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2	2	6.000.000.000	1	50.000.000.000	1	760.000.000	3	56.760.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
				2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B (Unit)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
				2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi (Orang)	0	10	104.000.000	10	104.000.000	10	104.000.000	30	312.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
				2.15.02.1.03.00010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	1	1	1.500.000.000	1	6.655.000.000	1	3.000.000.000	1	11.155.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
				2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLJ Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi (Dokumen)	4	4	890.000.000	4	890.000.000	4	890.000.000	12	2.670.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
				2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	20	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	30	1.200.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
				2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	5	4	490.000.000	4	490.000.000	4	490.000.000	12	1.470.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji (%)	75	72	910.000.000	74	910.000.000	76	910.000.000	76	910.000.000	76	2.730.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	2	2	220.000.000	3	320.000.000	3	320.000.000	8	860.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur						
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2	10	600.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	30	1.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur						
2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	9	90.000.000	9	90.000.000	9	90.000.000	27	270.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur						

		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia (Unit)	0	15	1.235.000.000	17	1.235.000.000	20	1.235.000.000	20	3.705.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	12	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	0	15	1.135.000.000	17	1.135.000.000	20	1.135.000.000	20	3.405.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia (Dokumen)	1	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	3	2.550.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	3	2.250.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan (Unit)	25	100	635.000.000	120	635.000.000	130	635.000.000	130	1.905.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	25	100	300.000.000	120	300.000.000	130	200.000.000	130	800.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	2	4	335.000.000	4	335.000.000	4	435.000.000	12	1.105.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan (Unit)	11	300	322.000.000	310	322.000.000	325	322.000.000	325	966.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	40	4	172.000.000	4	172.000.000	4	172.000.000	12	516.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	11	300	150.000.000	310	150.000.000	325	150.000.000	325	450.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur

		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP (Angka)	0,85	0,96	3.425.000.000	0,98	3.913.000.000	1	3.913.000.000	1	11.251.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan (Unit)	107	100	350.000.000	105	350.000.000	110	350.000.000	110	1.050.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	107	100	200.000.000	105	200.000.000	110	200.000.000	110	600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia (Dokumen)	1	2	900.000.000	2	850.000.000	1	850.000.000	5	2.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi (Dokumen)	1	2	900.000.000	2	850.000.000	1	850.000.000	5	2.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan (Badan Usaha)	100	60	275.000.000	65	275.000.000	70	275.000.000	70	825.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	88	60	125.000.000	65	125.000.000	70	125.000.000	70	375.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Laporan)	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	6	450.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur

		2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi (Unit)	0	1	1.900.000.000	2	2.438.000.000	3	2.438.000.000	3	6.776.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
		2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun (Unit)	0	2	1.900.000.000	2	2.438.000.000	2	2.438.000.000	6	6.776.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (%)	0	40	850.000.000	45	850.000.000	55	850.000.000	55	2.550.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
		2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian (%)	0	40	850.000.000	45	850.000.000	55	850.000.000	55	2.550.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
		2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	1	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	3	2.250.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
		2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
Tujuan 2 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Angka)	78,10	78,50	28.190.000.000	79,30	28.190.000.000	80,01	28.690.000.000	80,01	85.070.000.000	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	84,41	85,00		85,50		86,00		86,00					
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	73	76	28.190.000.000	77	28.190.000.000	78	28.690.000.000	78	85.070.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	81	83		85		87		87			
									28.190.000.000		28.190.000.000		28.690.000.000		85.070.000.000		
				2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	65	70	18.475.000.000	74	18.475.000.000	76	18.975.000.000	76	55.925.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	9.715.000.000	100	9.715.000.000	100	9.715.000.000	100	29.145.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu (%)	80	84	1.082.000.000	92	1.082.000.000	92	1.582.000.000	92	3.746.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	3	400.000.000	3	400.000.000	4	900.000.000	10	1.700.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	6	540.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16	4	152.000.000	4	152.000.000	4	152.000.000	12	456.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	60	900.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	89	93	15.420.000.000	94	15.420.000.000	95	15.420.000.000	95	46.260.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	84	88	14.600.000.000	90	14.600.000.000	90	14.600.000.000	90	43.800.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	681.600.000	12	681.600.000	12	681.600.000	36	2.044.800.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	28.400.000	12	28.400.000	12	28.400.000	36	85.200.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	60.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	36	120.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda

		2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik (%)	70	91	95.000.000	92	95.000.000	93	95.000.000	93	285.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	15	120.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah (%)	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	120.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	9	9	40.000.000	9	40.000.000	9	40.000.000	27	120.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	38	17	230.000.000	20	388.000.000	25	310.000.000	25	928.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	-	1	158.000.000	1	80.000.000	2	238.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	3	210.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	65	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	45	450.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik (%)	87	91	1.941.000.000	92	2.135.000.000	93	2.003.000.000	93	6.079.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	30	150.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	180	6	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	12	900.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	24	450.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.291.000.000	12	1.292.000.000	12	1.303.000.000	36	3.886.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	50.000.000	2	208.000.000	2	50.000.000	6	308.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	2	100.000.000	2	135.000.000	2	150.000.000	6	385.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah (%)	50	65	352.000.000	70	-	75	210.000.000	75	562.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	2	352.000.000	0	-	2	210.000.000	4	562.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu (%)	100	100	4.417.000.000	100	4.417.000.000	100	4.417.000.000	100	13.251.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	36	75.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	992.000.000	12	992.000.000	12	992.000.000	36	2.976.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.400.000.000	12	3.400.000.000	12	3.400.000.000	36	10.200.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda

		2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (%)	70	91	768.000.000	92	768.000.000	93	768.000.000	93	2.304.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	450.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	7	180.000.000	7	190.000.000	7	190.000.000	7	560.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Unit)	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	24.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	158	413	430.000.000	413	420.000.000	413	420.000.000	413	1.270.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		UPTD TERMINAL													
		2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik (%)	42	60	755.000.000	63	755.000.000	70	755.000.000	70	2.265.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	24	75.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	18	750.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	21	240.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	36	1.200.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah (%)	20	50	75.000.000	60	75.000.000	70	75.000.000	70	225.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	9	225.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu (%)	100	100	2.735.000.000	100	2.735.000.000	100	2.735.000.000	100	8.205.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	36	27.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	126.000.000	12	126.000.000	12	126.000.000	36	378.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.600.000.000	12	2.600.000.000	12	2.600.000.000	36	7.800.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (%)	25	30	280.000.000	40	280.000.000	50	280.000.000	50	840.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	6	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	105.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
		2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	17	77	245.000.000	87	245.000.000	97	245.000.000	97	735.000.000	UPTD Terminal	Samarinda

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024-2026.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel. 7.1 (TC.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD
(Indikator Kinerja Utama (IKU))

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks)	72	80	85	90	90
2	Rasio Konektivitas Provinsi (Angka)	0,816	0,846	0,864	0,882	0,882
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	73	76	77	78	78
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	81	83	85	87	87

Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Formulasi Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks) :

$$IKLI_{Dishub} = \frac{(Bobot1_{LLAJ} \times nTarget1_{LLAJ}) + (Bobot2_{LLAJ} \times nTarget2_{LLAJ}) + (Bobot3_{Pelayaran} \times nTarget_{Pelayaran}) + (Bobot4_{Kereta Api} \times nTarget_{Kereta Api})}{100}$$

Keterangan :

- Bobot1_{LLAJ} = Bobot Indikator 1 sektor LLAJ sebesar (65%)
- Bobot2_{LLAJ} = Bobot Indikator 2 sektor LLAJ sebesar (10%)
- Bobot_{Pelayaran} = Bobot Indikator sektor Pelayaran sebesar (20%)
- Bobot_{Kereta Api} = Bobot Indikator sektor Perkeretaapian sebesar (5%)
- nTarget1_{LLAJ} = Target Capaian Indikator 1 sektor LLAJ tahun ke-n
- nTarget2_{LLAJ} = Target Capaian Indikator 2 sektor LLAJ tahun ke-n
- nTarget_{Pelayaran} = Target Capaian Indikator sektor Pelayaran tahun ke-n
- nTarget_{Kereta Api} = Target Capaian Indikator sektor Perkeretaapian tahun ke-n

2. Formulasi Rasio Konektivitas Provinsi (Angka) :

$$KT_{Prov} = (KT_{DP} \times WT_{DP}) + (KT_{LSD} \times WT_{LSD}) + (KT_U \times WT_U) + (KT_P \times WT_P)$$

Keterangan :

KT_{Prov} = Rasio Konektivitas Provinsi

KT_{DP} = Rasio Konektivitas Transportasi Darat (KTDP) = (Jumlah Kawasan Strategis Provinsi, Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Perbatasan yang telah diberi subsidi , dan Pusat Kegiatan Nasional yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan DIBANDINGKAN Jumlah Kawasan Strategis Provinsi, Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Perbatasan yang telah diberi subsidi , dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan) (semua berjumlah 19 Kawasan berdasarkan RTRW Katim) Angka Rasio adalah 1 s/d 0. Dimana: 1 = seluruh lokasi yang ditetapkan TELAH terlayani; 0 = seluruh lokasi yang ditetapkan BELUM terlayani.

KT_{LSDP} = Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan SDP (KTLSDP) = Jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut, sungai dan danau DIBANDINGKAN dengan jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut *) sesuai dengan Sub Lampiran A1 dan Sub Lampiran A5 dalam KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah sebanyak 13 pelabuhan laut dan 50 dermaga sungai danau Angka Rasio adalah 1 s/d 0. Dimana: 1 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut TELAH terlayani; 0 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut BELUM terlayani.

KT_U = Rasio Konektivitas Transportasi Udara (KTU) = Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri + Bandara yang hanya melayani penerbangan perintis sesuai dalam KP Perintis + Bandara yang melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri dan perintis sesuai dalam KP Perintis) DIBANDINGKAN (Jumlah Bandara dalam RINBU (Rencana Induk Nasional Bandar Udara) sesuai KM 166 Tahun 2019 + Bandara yang melayani penerbangan perintis sesuai dengan KP Perintis (tidak masuk dalam RINBU) yaitu ada 10 Bandara (niaga dan perintis) (APT Pranoto, SAMS, Melalan, Tanjung Bara, Kalimantan, Maratua, Datar Dawai, Ujoh Bilang, Paser, Uyang Lahai).

KT_P = Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan (KTP) = Jumlah kawasan perkotaan prioritas yang telah dikembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan DIBANDINGKAN Jumlah kawasan perkotaan prioritas Apabila dalam 1 kota sudah ada layanan sistem angkutan umum massal (SAUM) perkotaan maka dihitung = 1 ; Apabila dalam 1 kota belum ada layanan sistem angkutan umum massal (SAUM) maka dihitung = 0 ; 3 Kawasan Perkotaan Prioritas (Samarinda, Balikpapan, Bontang) berdasarkan RTRW Kaltim.

WT_{DP} = Bobot konektivitas transportasi darat & penyeberangan (35,7%)

WT_{LSD} = Bobot konektivitas transportasi laut & sungai danau (35,7%)

WT_U = Bobot konektivitas transportasi udara (25%)

WT_P = Bobot konektivitas transportasi perkotaan (3,6%)

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan oleh dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah adalah nilai rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan di Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan penerapan penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tabel. 7.2 (TC.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Program Perangkat Daerah
(Indikator Kinerja Kunci (IKK))

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	195	175	165	155	155
2	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP (%)	74	82	86	90	90
3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan (Angka)	0,008	0,006	0,005	0,004	0,004
4	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP (%)	0,85	0,91	0,96	0,98	0,98
5	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (%)	0	40	45	55	55
6	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	62	70	74	76	76
7	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100

Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) :

1. Jumlah kecelakaan di jalan Provinsi merupakan jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di ruas – ruas jalan provinsi dimana datanya didapat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

2. Formulasi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP :

$$P_{llakdp} = a \left(\frac{\sum Trayek_{eksisting}}{Trayek_{kebutuhan}} \times 100 \right) + b(\text{Rata – Rata Bobot Pemenuhan SPM Terminal}) + c((1 - (\text{Rata – Rata V/C ratio}) \times 100)) + d \left(\frac{\text{Kejadian Kecelakaan}_{jalan Prov.}}{\text{Kejadian Kecelakaan}_{jalan Kaltim}} \times 100 \right)$$

Keterangan :

P_{llakdp} = Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP

a = Bobot Rasio Trayek AKDP (60%)

b = Bobot Pemenuhan SPM Terminal Tipe B (20%)

c = Bobot Rata – Rata V/C Ratio Ruas Jalan Provinsi (10%)

d = Bobot Rasio Kejadian Kecelakaan di Jalan Provinsi (10%)

3. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan adalah kejadian kecelakaan Angkutan Umum AKDP dan Perintis di Kalimantan Timur setiap 1000 (seribu) keberangkatan.

4. Formulasi Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP :

$$KT_{SDP} = \frac{\sum Trayek SDP_{eksisting}}{Trayek SDP_{kebutuhan}}$$

Keterangan :

KT_{SDP} = Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP

Trayek $SDP_{eksisting}$ = Jumlah Trayek SDP yang ada

Trayek $SDP_{kebutuhan}$ = Jumlah Trayek SDP yang dibutuhkan

5. Formulasi Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian :

$$P_{KBJP} = \frac{\sum \text{Dokumen}_{eksisting}}{\text{Dokumen}_{kebutuhan}} \times 100$$

Keterangan :

P_{KBJP} = Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian

$\text{Dokumen}_{eksisting}$ = Jumlah Dokumen yang dibuat berupa Dokumen Hasil Studi dan Penetapan Gubernur (Pergub/SK Gub)

$\text{Dokumen}_{kebutuhan}$ = Jumlah Dokumen yang dibutuhkan

6. Formulasi Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan :

$$\text{Indeks}_{Sekt} = (P_{renca} \times \text{Bobot}_{renca}) + (P_{keuangan} \times \text{Bobot}_{keuangan}) + (P_{SDM} \times \text{Bobot}_{SDM}) + (P_{sarpras} \times \text{Bobot}_{sarpras})$$

Keterangan :

Indeks_{Sekt} = Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan

P_{renca} = Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu

P_{keuangan} = Persentase realisasi anggaran

P_{SDM} = Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

P_{Sarpras} = Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik

Bobot_{Renca} = Bobot sub komponen perencanaan (40%)

Bobot_{keuangan} = Bobot sub komponen keuangan (30%)

Bobot_{SDM} = Bobot sub komponen SDM (25%)

Bobot_{Sarpras} = Bobot sub komponen Sarpras (5%)

7. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti :

$$P_{layanan} = \frac{\text{Keluhan Layanan}}{\text{Keluhan Layanan Ditindak Lanjuti}} \times 100$$

Keterangan :

P_{layanan} = Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti

Keluhan Layanan = Keluhan Layanan yang masuk terkait pelayanan publik di Dinas Perhubungan

Keluhan Layanan Ditindak Lanjuti = Keluhan Layanan yang masuk terkait pelayanan publik di Dinas Perhubungan yang ditindaklanjuti

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan :

Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 menggambarkan perencanaan 3 (tiga) tahun kedepan sebagai langkah pedoman pentahapan rencana indikatif program, kegiatan dan pembiayaan pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan referensi dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta bahan untuk pemantauan serta evaluasi kinerja pelayanan dan rencana pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur yang fungsinya sebagai pedoman dalam penjabaran program kerja 3 (tiga) Tahun sebagai instrument pencapaian Sasaran dan Tujuan RPD 2024 – 2026.

8.2. Saran :

1. Dokumen Renstra agar dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
2. Dokumen Renstra agar dijadikan pedoman dalam pengukuran kinerja Tahunan;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang telah tertuang dalam Dokumen Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Indikator Kinerja IKK;
- 4 Untuk keselarasan dan sinergitas pencapaian Tujuan dan Sasaran dan dalam upaya mengimbangi kedinamisan tuntutan masyarakat, Dokumen Renstra dapat dilakukan review menyesuaikan kebijakan Pimpinan Daerah.

Samarinda, Mei 2023

KEPALA DINAS



YUDHA PRANOTO, S.E.
NIP. 196408172010061001

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19690512 198903 2 009